



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2019

Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2019



Rencana kerja dan anggaran
Capaian kinerja organisasi
Realisasi anggaran
Evaluasi internal
Optimalisasi penganggaran berbasis kinerja



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99,
KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12110;
TELEPON (021) 7394666, 7204131;
FAKSIMILI (021) 7261775;
SITUS www.bppk.depkeu.go.id

Executive Summary

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, dari 18 IKU terdapat seluruhnya berstatus hijau dengan perincian sebagai berikut:

1. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya dengan realisasi sebesar 96.03%, dari target sebesar 90%.
2. Persentase Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya dengan realisasi sebesar 99,78% dari target sebesar 75%.
3. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dengan realisasi sebesar 95,47% dari target sebesar 92 %.
4. indeks kepuasan pengguna layanan dengan realisasi sebesar 4,73 dari target sebesar 4,39.
5. Persentase pengembangan *Instructional System Design* dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.
6. Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital dengan realisasi sebesar 49,55% dari target sebesar 30%.
7. Tingkat pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC dengan realisasi sebesar 114,52% dari target sebesar 100%.
8. Indeks kualitas penelitian dengan realisasi sebesar 98 dari target sebesar 50.
9. Persentase kualitas implementasi program sertifikasi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 70 %.
10. Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A dengan realisasi sebesar 100 %, dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
11. Indeks pemenuhan standar mutu dengan realisasi sebesar 4, dari target sebesar 3.
12. Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan realisasi sebesar 97,47 %, dari target yang ditetapkan sebesar 94%.
13. Persentase proses penempatan talent pada jabatan target dengan realisasi sebesar 92,75 %, dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
14. Indeks persepsi integritas dengan realisasi sebesar 91,64, dari target sebesar 90,45.
15. Persentase penyelesaian program transformasi digital dengan realisasi sebesar 99,91%, dari target sebesar 80%.
16. Persentase Tingkat downtime sistem TIK dengan realisasi sebesar 0%, dari target 0,10%.

17. Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 98,20%, dari target sebesar 90%.
18. Presentasi kualitas pelaksanaan anggaran dengan realisasi sebesar 99,48%, dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif		
Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	25%	106,70
Customer	15%	109,82
Internal Process	30%	113,21
Learning & Growth	30%	111,85
Nilai Kinerja Organisasi		110,66

Catatan status NKO:
 $100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi;
 $80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi
 $x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi



Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pada periode Tahun Anggaran 2019 ini, BPPK memiliki 1 program dan 9 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 635.393.838.000 pada Tahun Anggaran 2019 ini dan telah terealisasi untuk membiayai program kegiatan sebesar Rp 608.639.762.386

Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran periode tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 0.1
Pagu Anggaran serta realisasi Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	635.293.838.000	608.639.762.386	95,80
1731	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	159.286.544.000	151.004.054.192	94,80
1732	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	27.921.526.000	26.351.932.677	94,38
1733	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	27.397.893.000	25.164.966.472	91,85

1734	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	28.425.646.000	25.861.647.063	90,98
1735	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	27.050.063.000	26.534.074.287	98,09
1736	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	35.743.823.000	34.893.305.820	97,62
1737	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan	125.037.747.000	120.168.800.587	96,11
1738	Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	147.058.823.000	143.082.479.467	97,30
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	57.371.773.000	55.578.501.821	96,87

Sumber : Data Bagian Keuangan;

Kata Pengantar

Perjalanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam menerapkan strategi Corporate University sudah efektif berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini. Dalam perkembangannya, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia bersifat dinamis. Sebagai unit yang memberikan dukungan penuh atas pengembangan tersebut, maka sudah seharusnya Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk terus berbenah dan mengevaluasi diri.

Tahun 2019 adalah akhir dari rangkaian perjalanan Renstra 2015-2019. Tentunya, semangat ini akan diperbaharui dengan adanya Renstra yang baru untuk tahun 2020-2024. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan juga masih mengemban amanat yang lain yaitu inisiatif strategis terkait implementasi 70% full e-learning yang harus sudah tercapai pada tahun 2021. Perubahan kebijakan strategis dan target yang benar-benar menantang tersebut, juga mendorong Badan Pendidikan dan Pelatihan mencapai kinerja terbaik.

Tahun 2019 juga menjadi tahun perubahan. Pada tahun ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah mengajukan usulan penataan organisasi. Hal ini dikarenakan organisasi yang ada saat ini tidak lagi fit untuk mendukung pencapaian kinerja yang semakin menantang Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Perlu bertransformasi menjadi organisasi yang lean, green, and clean.

Kami sangat memahami, bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini lebih dari sekedar untuk memenuhi kewajiban formal. Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran kepada stakeholders mengenai progress yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam merespon perubahan-perubahan. Laporan ini juga memberikan baseline dalam penilaian kinerja satuan kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penataan organisasi kedepannya.

Kami berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu pembaca. Kami mohon bantuan kerjasama dan dukungan agar Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat terus memberikan manfaat kepada Kementerian Keuangan khususnya terkait dengan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kepala Badan,

ttd

Rionald Silaban



Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah mencapai 110,66%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

110,66%

Nilai Kinerja Organisasi

BPPK sebagai mitra strategis bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai. Besarnya dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Laporan kinerja Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK pada Tahun 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Besaran Nilai Kinerja Organisasi adalah 110,66. Delapan belas (18) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target yang ditetapkan merupakan cerminan efektivitas kinerja BPPK yang baik. Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi kelembagaan serta upaya aktif anti korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.

Dari sisi penggunaan anggaran, periode Tahun 2019, BPPK mendapat anggaran sebesar RP 635.393.838.000,00 atau lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, dan untuk Tahun 2019 terealisasi penyerapan sebesar Rp. 608.639.762.386. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana penyerapan atau proyeksi anggaran yang ditetapkan.

Rionald Silaban

Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan

Daftar Isi

EXECUTIVE SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR DIAGRAM	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sistematika Penyajian	2
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja	
A. Pendahuluan	5
B. Visi BPPK	5
C. Misi BPPK	5
D. Arah Kebijakan dan Strategi	6
E. Target Kinerja.....	21
F. Penetapan Kinerja	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Renstra	24
B. Capaian Kinerja.....	24
C. Realisasi Anggaran.....	66
D. Realisasi Output Kegiatan	69
E. Kinerja Lainnya	74
Bab IV Penutup	
Penutup.....	104

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Penetapan Kinerja BPPK Tahun 2019

Lampiran II Pengukuran Kinerja BPPK Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Pagu Anggaran serta Realisasi Tahun 2019	v
Tabel 2.1	Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	16
Tabel 2.2	Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2019	18
Tabel 3.1	Capaian Renstra BPPK Tahun 2019	24
Tabel 3.2	Target dan Realisasi serta Capaian IKU Triwulan III BPPK Tahun 2019	25
Tabel 3.4	Realisasi <i>Output</i> Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2019	64
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2019	68
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran dan <i>Output</i> Kegiatan BPPK Tahun 2019	70

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Struktur Organisasi BPPK	3
Diagram 2.1	<i>Strategy Map</i> BPPK Tahun 2019	17





PENDAHULUAN

A	Latar Belakang	1
B	Tugas dan Fungsi	1
C	Struktur Organisasi	2
D	Sistematika Penyajian	2

BAB 01

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2019 ini juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja BPPK di periode yang akan datang.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

BPPK terdiri dari Sekretariat Badan, 6 Pusdiklat (Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum) serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Untuk penyelenggaraan diklat di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yaitu 11 Balai Diklat Keuangan (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado) dan 1 Balai Diklat Kepemimpinan (Magelang). Struktur organisasi BPPK seperti terlihat dalam Diagram 1.1 .

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tugas dan Fungsi
 - C. Struktur Organisasi
 - D. Sistematika Penyajian
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
 - A. Pendahuluan
 - B. Visi
 - C. Misi
 - D. Arah Kebijakan dan Strategi
 - E. Target Kinerja
 - F. Penetapan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Renstra
 - B. Capaian Kinerja
 - C. Realisasi Anggaran
 - D. Kinerja Lainnya
- Bab IV Penutup

Diagram 1.1
Struktur Organisasi BPPK







PERENCANAAN KINERJA

A	Pendahuluan	4
B	Visi BPPK	4
C	Misi BPPK	4
D	Arah Kebijakan dan Strategi	5
E	Target Kinerja	5
F	Penetapan Kinerja	6

BAB 02

P E R E N C A N A A N
D A N
P E N E T A P A N
K I N E R J A

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015–2019, setiap Unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan hal ini, Renstra BPPK tahun 2015–2019 disusun berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015–2019. Pada saat ini, BPPK telah menetapkan rencana strategis tahun 2015–2019 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2015–2019 yang didalamnya berisi tentang: visi, misi, arah kebijakan, dan strategi serta target kinerja BPPK selama periode Tahun 2015–2019.

B. Visi BPPK

BPPK telah menetapkan visi tahun 2015–2019, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia. Visi ini menggambarkan BPPK memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola keuangan yang handal dan profesional tidak hanya untuk Kementerian Keuangan namun juga untuk instansi di luar Kementerian Keuangan.

C. Misi BPPK

Dalam mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, BPPK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang terintegrasi dalam mewujudkan *Corporate University*.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

D. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun 5 arah kebijakan dan 15 strategi untuk mendukung pencapaian kelima arah kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Strategi untuk mewujudkan organisasi yang *fit for purpose* untuk mengembangkan *Corporate University* di Kementerian Keuangan
2. Strategi untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif
3. Strategi untuk mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna
4. Strategi untuk mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM
5. Strategi untuk mewujudkan jaminan kualitas *output* layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

Arah Kebijakan dan Strategi 1:

Terwujudnya organisasi yang *fit for purpose* dalam rangka mengembangkan *Corporate University* di Kementerian Keuangan melalui:

1. Penataan organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan, pengembangan dan evaluasi diklat:
 - Menerapkan struktur *governance* Kemenkeu *Corporate University* sebagai *Learning Organization*. Struktur *governance* Kemenkeu *Corporate University* adalah susunan peran dan tugas dari pihak-pihak yang terlibat dan berperan kunci dalam penerapan Kemenkeu *Corporate University*.
 - Penguatan kelembagaan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.
 - Menyelaraskan (terkait regulasi) peraturan SDM yang lain guna mendukung implementasi HCM melalui *Corporate University*.
 - Blueprint Kemenkeu Corpu: KEP-140/PP/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Cetak Biru Kemenkeu Corpu
 - Logo Kemenkeu Corpu: KMK nomor 563/KMK.011/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Logo Kemenkeu Corpu
 - Ditetapkannya Peraturan Kepala BPPK Nomor :
 - a. PER-4/PP/2017 tentang Instructional System Design dan
 - b. PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran

- Pembentukan *Project Management Office* melalui KEP-66/PP/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (*Project Management Office*) Kemenkeu Corpu BPPK
 - Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*
 - Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Pembentukan *Project Management Office* melalui KEP-55/PP/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim RBTK (PMO) Kemenkeu Corpu BPPK
 - Ditetapkannya Peraturan Kepala BPPK Nomor :
 - a. PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran,
 - b. PER-2/PP/2018 tentang Surat Keterangan Pembelajaran, dan
 - c. PER-8/PP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Micro-learning
 - Penyelenggaraan program prioritas nasional Pelatihan Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018 dan 2019 dengan total jumlah 4.479 peserta dari 1.369 desa
 - Terwujudnya *Learning Council Meeting* Kementerian Keuangan
 - Ditetapkannya:
 - a. PER-2/PP/2019 tentang Pedoman e-Learning di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - b. KEP/132/PP/2019 tentang Pembentukan Tim *Project Management Office* Penataan Organisasi BPPK
 - NDR-7/PP/2019 kepada Menteri Keuangan tentang Usulan Penataan Organisasi BPPK
2. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai Diklat Kepemimpinan
- Peresmian pembangunan Gedung Baru BDK Pontianak pada tanggal 20 Desember 2016
 - Seluruh Pusdiklat dan PKN STAN menyelenggarakan *Night Open Class* dan *Capacity Building* antara lain: Diklat, Seminar, FGD (non Rapat) sebanyak minimal dua kali/bulan.
 - Peresmian pembangunan asrama Pusdiklat Pajak pada tanggal 14 November 2018
 - Pengalihan Pusdiklat PSDM dan KNPk ke Purnawarman (Kecuali Bagian Pengelolaan Beasiswa tetap di Bintaro).
 - Peresmian pembaruan fisik pendopo dan Gedung B BDK Magelang pada tanggal 19 Maret 2019
 - Pemanfaatan kelas untuk pelatihan secara perdana BDK Pekanbaru pada tanggal 10 September 2019

Arah Kebijakan dan Strategi 2:

Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna.

1. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan:

- *Workshop Corporate University* di Tahun 2016
- Bimbingan teknis *Knowledge Capture* di Tahun 2016
- Mengikuti *Corpu Summit* di Amsterdam di Tahun 2016
- Widyaiswara Competency Update (WICU) di Tahun 2017
- Pelatihan penyusunan Storyboard kepada Widyaiswara di Tahun 2017
- Mengikuti *Corpu Summit* di Berlin di Tahun 2017
- Pelatihan dan Sertifikasi *Knowledge Management* di Amerika Serikat di Tahun 2017
- *Short Course* Implementasi *Corporate University* di Queensland, Australia di Tahun 2017
- *Short Course* Implementasi *micro learning* di Auckland, Australia di Tahun 2017
- Pelatihan *Enterprise Architecture* di Malaysia di Tahun 2017
- Seminar dan kuliah umum dengan narasumber Luar Negeri, seperti profesor dari *The University Adelaide, University of Southern California, dan The Treasury Australia* di Tahun 2017
- Pelatihan penyusunan *Storyboard* kepada Widyaiswara di Tahun 2017
- Mandatory *e-learning Corporate University* di Tahun 2018
- Mengikuti *Corpu Summit* di Berlin di Tahun 2018
- Pelaksanaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Tahun 2018
- Pelaksanaan Pelatihan *Knowledge Management* oleh Telkom Corpu di Tahun 2019
- Pelaksanaan Pelatihan 10:20:70 oleh Telkom Corpu di Tahun 2019
- Mengikuti GCCU di Sao Paulo, Brazil di Tahun 2019
- Pelaksanaan *secondment* pada BRI Corpu di Tahun 2019

2. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas kegiatan yang dilaksanakan:

- Penataan pelaksanaan kerja sama program diklat dengan K/L yang dibiayai APBN melalui ditetapkannya peraturan Kepala BPPK tentang KSPD Nomor Per-2/PP/2016.
- Inisiasi Pengembangan Forum Pengembangan SDM K/L yang diikuti oleh 14 Kementerian/Lembaga di Indonesia pada tanggal 18 September 2017.
- Tergabung dalam Global Council of Corporate Universities 21 Agustus 2017

- Pusdiklat PSDM telah bekerja sama dengan Australia Award Indonesia untuk pendanaan beasiswa 20 karyasiswa split site UI-kampus di Australia;
 - Pusdiklat BC menjadi tuan rumah dalam *The 2nd Joint Customs Middle Management Programme (JCMMP)* pada tanggal 31 Juli–3 Agustus 2017
 - Pusdiklat BC menjadi tuan rumah dalam *The Regional Workshop on Valuation and Post Clearance Audit (PCA)* pada tanggal 20 – 23 November 2017
 - PKN STAN telah tergabung dalam International Network Customs University sebagai wakil Indonesia dan konferensi Kepabeanaan Internasional (PICARD) 2017 di Tunisia
 - PKN STAN telah melaksanakan kerja sama dengan Charles Sturt University, Politeknik Maritim Indonesia, dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPP)
 - Pusdiklat KU menjadi tuan rumah Regional Meeting GDLN Asia Pacific pada bulan April 2018 di Jakarta
 - Menjadi host pelatihan jarak jauh (webinar) GDLN Asia Pacific dengan tema *Enhancing Policy Making Through Creative and Innovative Learning in Digital Economy Era*
 - Menjadi narasumber dalam kegiatan Public Finance Management Reform Program di Laos
 - Penandatanganan MoU antara PKN STAN dan *Queensland University Technology (QUT)* Australia (tanya STAN)
 - Pusdiklat BC menjadi tuan rumah dalam beberapa workshop dan seminar internasional pada tahun 2019
 - Kerjasama *Capacity Building* antara BPPK dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (Malaysia)
 - *Benchmarking* dalam rangka Pusdiklat BC menuju *Regional Training Center World Customs Organization* ke Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan India
 - Menerima kunjungan *Ministry of Finance of Lao People Democratic Republic (Laos)* dalam rangka mempelajari Corpu dan *e-learning*
3. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang akurat. Kegiatan yang dilaksanakan:
- Menyusun *Instructional System Design (ISD)*. ISD adalah sistem atau prosedur untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan dapat diandalkan. Proses desain pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang memerlukan kreativitas, peran aktif, dan terus dikembangkan secara berulang oleh institusi pendidikan. Telah disusun dan ditetapkan pedoman penyusunan ISD melalui Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017.

- BPPK sebagai unit penyelenggara pembelajaran (diklat) pada Kemenkeu Corpu telah melakukan piloting Implementasi ISD berupa pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan Konsep Pedoman Penyusunan ISD pada beberapa diklat tahun 2017.
 - Penetapan IKU pembelajaran kreatif yang mengkonversi KAP versi lama menjadi ISD dengan target 100%.
4. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian utama dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan:
- Membangun *Knowledge Management System* (KMS) dan infrastruktur lainnya: KMS adalah sistem yang mengidentifikasi, meng-*capture*, menyimpan, dan mendistribusikan *knowledge* yang ada di organisasi, sehingga orang lain bisa belajar dan mendapatkan manfaat darinya. Pengembangan KMS yang sudah dimulai dari tahun 2015 dengan menyusun konsep dan melakukan diklat terkait KMS. Pada tahun 2016 *Knowledge Management* telah *go live* melalui *Kemenkeu Learning Centre* dengan 55 *online learning material*, dan 661 dokumen pengetahuan.
 - Membentuk *Community of Practice*: *Community of Practice* adalah strategi yang melibatkan komunitas yang terdiri dari para pejabat dan pegawai dengan pengalaman kerja langsung menggunakan *knowledge* tertentu. Komunitas tersebut kemudian merumuskan inisiatif dan metode terbaik dalam menyelesaikan isu-isu terkait dengan pekerjaannya. Perumusan inisiatif dan metode dimaksud menggunakan metode *sharing knowledge* yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaannya. Selama tahun 2017 telah dibentuk 60 *Community of Practice* dan jumlah ini masih akan terus bertambah.
 - Penetapan KEP-118/PP/2019 tentang Standar Pendokumentasian Pengetahuan (Knowledge Capture)
 - Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - Penyampaian usulan Perpres dan OTK Penataan Organisasi BPPK kepada Menteri Keuangan (NDR-7/PP/2019)
 - Saat ini KLC telah memiliki 429 online course dan 2592 knowledge documents

Arah Kebijakan dan Strategi 3:

Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM.

1. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kompetensi yang dilaksanakan:

- Menginisiasi *Retire Faculty Program* dan *Leader as Teacher*.
 - *Retire Faculty Program* adalah kapitalisasi pengetahuan, khususnya *tacit knowledge*, yang dimiliki oleh para pegawai/pejabat senior yang memiliki kompetensi khusus.
 - *Leader as Teacher* adalah transfer *knowledge, wisdom*, dan pengalaman para pimpinan kepada para pegawai Kementerian Keuangan.
 - Telah dilakukan pelatihan untuk 626 orang *Leader as Teacher* dan 91 orang *Retired Prominent Faculty*.
2. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni:
- Pelaksanaan Widyaiswara *competency update* di seluruh Pusdiklat dan BDK.
 - *Capacity Building Knowledge Capture Crew*.
 - Pelatihan di dalam dan luar negeri
 - Penugasan Widyaiswara dalam konferensi/workshop/seminar nasional dan internasional
 - *Workshop Profesional Interview Technic*
3. Pengembangan budaya riset yang berkualitas:
- Penerbitan 7 hasil penelitian Dosen PKN STAN, dimana 4 di antaranya diterbitkan dalam *International Journal*, 6 jurnal PKN STAN, dan 2 buku pembelajaran untuk mahasiswa yaitu buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah I dan II serta buku Kupas Tuntas PPh Potput.
 - PKN STAN telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan *Call For Paper* Kebijakan Fiskal Indonesia dan menjadi delegasi dalam acara *call for papers* di Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Batam, dan Politeknik Negeri Semarang.
 - Pelaksanaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2018 di Pusdiklat Pajak dengan *keynote speaker* Menteri Keuangan.
 - Penerbitan Jurnal BPPK volume 11 no 1 dan 2 tahun 2018.
 - Pelaksanaan kajian akademi sejumlah 5 penelitian pada tahun 2018.
 - Membangun *Learning Organization*: Organisasi pembelajar (*learning organization*) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Arah Kebijakan dan Strategi 4:

Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif:

1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita.
 - Beasiswa Spirit untuk pegawai Kemenkeu (total 198 karyasiswa dari tahun 2015 s.d. 2017)
 - Penyelenggaraan executive training bagi pejabat eselon 1 dan 2 atau sederajat
 - Beasiswa menggunakan sumber dana Rupiah Murni di lingkungan Kemenkeu melalui beasiswa FETA.
 - Piloting 12 pelatihan killer program dalam menerapkan model pembelajaran 10:20:70.
 - Penguatan pembelajaran digital/online melalui launching Kemenkeu Learning Center pada tanggal 31 Maret 2017
 - Dimulainya pelaksanaan Open Class.
 - Penyelenggaraan program prioritas nasional Pelatihan Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018 dan 2019 dengan total jumlah 4.479 peserta dari 1.369 desa.
 - Penetapan IKU BPPK "Alumni yang Meningkatkan Kinerjanya" sebagai wujud continuous improvement melalui pengukuran dampak pembelajaran terhadap peningkatan kinerja dengan mekanisme pengukuran menggunakan metode evaluasi Kirkpatrick level 4 dengan sample pelatihan yang diutamakan berasal dari AKP strategis
 - Penetapan IS RBTK modern e-learning melalui KMK 302/KMK.01/2019 dengan target 30% program pelatihan
 - Pelaksanaan mandatory e-learning Kode Etik dan Kode Perilaku bagi lebih dari 80.000 pegawai Kemenkeu.
 - Launching mandatory e-learning cross function Pengelolaan Keuangan Negara untuk lebih dari 80.000 pegawai Kemenkeu.
 - Penetapan IKU mandatory untuk seluruh Pengelola SDM level unit eselon I Kemenkeu "Persentase Ketepatan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai".
2. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (*link and match*) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan:
 - Melakukan perbaikan mekanisme Identifikasi kebutuhan Diklat (IKD): Telah disusun Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yaitu PMK nomor 45/PMK.011/2017 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran lingkup Kementerian Keuangan untuk menggantikan PMK IKD 37/PMK.012/2014. PMK ini memuat AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individual yang lebih komprehensif dibandingkan analisis IKD yang hanya

menitikberatkan pada satu metode.

- Menyusun pola pembelajaran untuk *Critical Job. Learning Journey* adalah serangkaian pembelajaran yang diperlukan oleh suatu jabatan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan kompetensi dari tiap jabatan. BPPK telah menetapkan Standar Kompetensi Teknis Manajemen Kediklatan di BPPK dalam Keputusan Kepala BPPK nomor KEP139/PP/2017, menyusun pola pembelajaran jabatan-jabatan terkait tusi kediklatan di BPPK.
 - Penetapan PMK 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran lingkup Kementerian Keuangan.
 - Assessment Competency Gap Index bagi pejabat Eselon III dan Eselon IV di Pusdiklat dan Balai sesuai dengan KEP-139/PP/2017
 - Penerapan evaluasi pasca pembelajaran dengan menggunakan mekanisme Kirkpatrick level 4 (PER-1/PP/2018)
 - Evaluasi pasca pembelajaran dengan sample pelatihan yang diutamakan berasal dari AKP strategis
 - Penetapan IKU mandatory untuk seluruh Pengelola SDM level unit eselon I Kemenkeu "Persentase Ketepatan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai"
3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan Negara-STAN:
- Optimalisasi lulusan STAN untuk pemenuhan formasi CPNS.
 - Alokasi lulusan PKN STAN untuk K/L lain.
 - Penerimaan 120 dosen Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dengan beban 30% dari dosen Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/dosen tetap.
 - Waktu perkuliahan Senin-Jumat: Pukul 07.30–21.30 WIB, Sabtu Pukul 07.30–17.00 WIB.
 - Meningkatkan kapasitas untuk mahasiswa baru dengan metode Blended Learning: tatap muka 75%, Studi mandiri/online learning 25% rekrutmen jabatan fungsional dosen PKN STAN
 - penerimaan mahasiswa afirmasi dari NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua
 - Penggabungan mahasiswa dari berbagai program diploma 3 dalam satu kelas untuk foundation course pada tingkat I
 - Rekrutmen jabatan fungsional dosen PKN STAN
 - penerimaan mahasiswa afirmasi dari NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua
 - Penggabungan mahasiswa dari berbagai program diploma 3 dalam satu kelas untuk foundation course pada tingkat I

Arah Kebijakan dan Strategi Ke-5:

Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi:

1. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK:
 - Penerapan evaluasi pembelajaran dengan pola baru (Menerapkan *Learning Quality System*, mekanisme sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh BPPK selaku penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk memastikan terpenuhinya diklat yang terstandarisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta diklat dan mencapai target kinerja dari Eselon I di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2018 telah disusun dan ditetapkan *Learning Quality System* dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
 - Evaluasi Pembelajaran: PER-5/PP/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Evaluasi Model Kirkpatrick Level 3&4: PER-1/PP/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pedoman Evaluasi Pasca Pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan. *Kick Off* pelaksanaan Evaluasi level 3 dan 4 di Pusdiklat dan Balai Diklat dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018.
 - Ditetapkannya PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pasca Pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Kick Off pelaksanaan Evaluasi level 3 dan 4 di Pusdiklat dan Balai Diklat hari Jumat tanggal 29 Juni 2018
 - Ditetapkannya KEP-97/PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembelajaran di lingkungan BPPK
 - Penetapan KEP-124/2019 tentang Standar Mutu Pembelajaran di lingkungan BPPK
2. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara:
 - Bulan Mei 2016, BPPK melalui Pusdiklat KNPB mendapatkan sertifikat lisensi BNSP sebagai “Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP P2)” (Kep Kepala BNSP nomor: BNSP-LSP-457-ID tanggal 10 Mei 2016).
 - Standar Kompetensi Teknis Manajemen Pelatihan: KEP-139/PP/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Manajemen Pelatihan.
 - Bulan Agustus 2017, BPPK mendapatkan sertifikat dari LAN sebagai “Instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis untuk pelatihan teknis bidang keuangan negara di bawah Kemenkeu dan Lembaga Pelatihan Pemerintah lainnya” (Kep Kepala LAN nomor: 239K.1/PDP.09/2017 tanggal 2 Agustus 2017).

- Tahun 2018 BPPK telah melakukan akreditasi terhadap Pemprov DKI dan mendapat penilaian B.
 - Penetapan PER-2/PP/2015 tentang Sertifikasi Ahli Kepabeanan
 - Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Kepabeanan
 - Pelaksanaan Uji Kompetensi JFAA Tahun 2018 BPPK telah menyusun PER-7/PP/2018 tentang Pedoman Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran
3. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK
- Implementasi ISO 9001:2008 untuk seluruh Pusdiklat
 - Penetapan KEP-139/PP/2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Manajemen Pelatihan
 - Penetapan KEP-148/PP/2017 tentang Pedoman Standar Ruang Kelas Pintar (Smart Classroom) di Lingkungan BPPK.
 - Penetapan PER-3/PP/2018 tentang Akreditasi Program Pelatihan di bidang Keuangan Negara.
 - Penetapan IKU Pemenuhan Penjaminan Kualitas Pembelajaran dengan target index 3.0 dari skala 5.0.
 - Pelaksanaan Penilaian Kualitas Pembelajaran di lingkungan BPPK.

B. Target Kinerja

Pada tahun 2015-2019, BPPK berusaha menjadi mitra strategis bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- a. Nilai Peningkatan Kompetensi SDM (yang kemudian diubah menjadi Persentase Alumni Pelatihan yang meningkat kinerjanya sejak tahun 2018).
- b. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan.
- c. Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

Rincian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 s.d. 2019 yang tertuang dalam Renstra BPPK Tahun 2015-2019 dengan adanya perubahan pada indikator Nilai Peningkatan Kompetensi SDM menjadi Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya (evaluasi pasca pembelajaran dengan Kirkpatrick level 4) dan peningkatan target Persentase Lulusan

Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik pada tahun 2019 dari 90% menjadi 92% seperti tertuang dalam tabel halaman berikut:

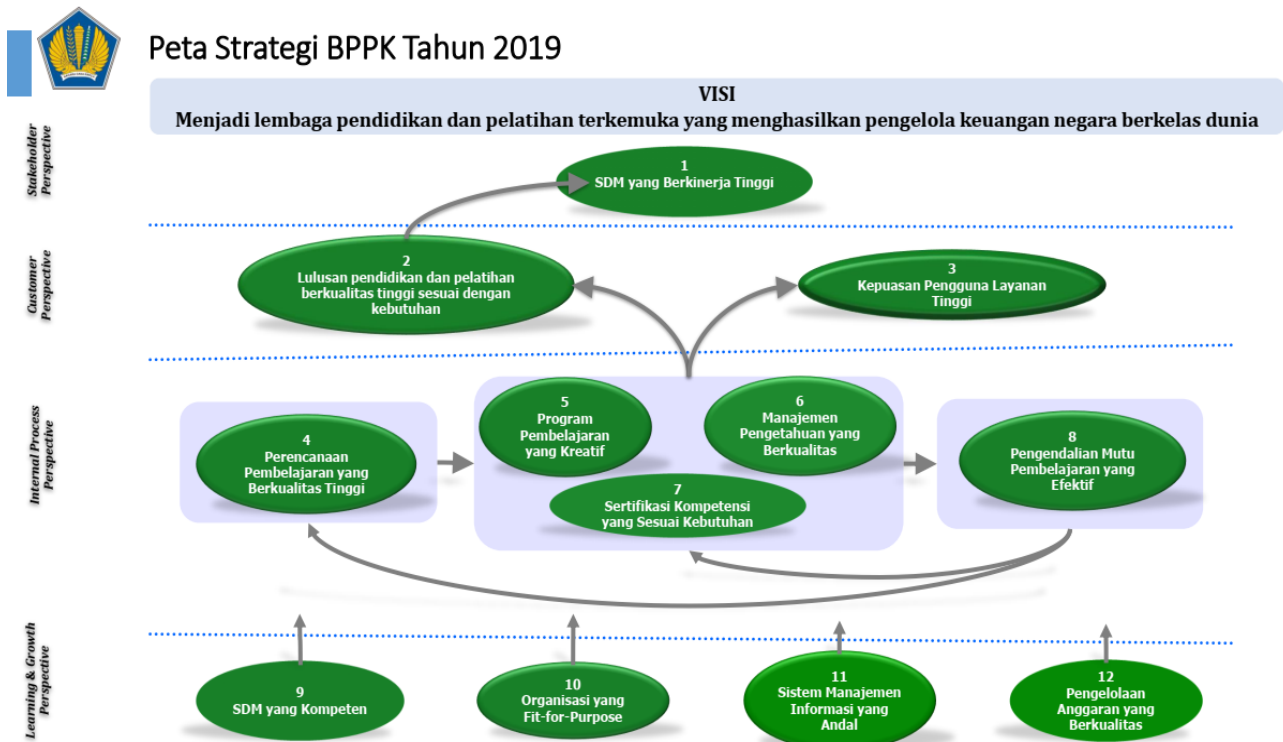
Tabel 2.1
Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

NO	Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara					
	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	-	-	-	70	90
	Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
	Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.	90.00	90.00	90.00	90.00	92.00

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut ini adalah *Strategy Map* dan IKU BPPK berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPK untuk Tahun 2019:

Diagram 2.1
Strategy Map BPPK Tahun 2019



Tabel 2.2
Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2019

Program	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)		Indikator Kinerja Utama		Target 2019
1	2		3		4
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementrian Keuangan	1	SDM yang berkinerja tinggi	1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
	2	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	75%
			2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	92%
	3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,39
	4	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi	4a-N	Persentase pengembangan <i>Instructional System Design</i>	100%
	5	Program pembelajaran yang kreatif	5a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	30%
	6	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	6a-N	Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%
			6b-N	Indeks kualitas penelitian	50
	7	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	7a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%
	8	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif	8a-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%
			8b-N	Indeks pemenuhan standar mutu	3
	9	SDM yang kompeten	9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	94%
			9b-N	Persentase proses penempatan talent pada jabatan target	80%
	10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10a-CP	Indeks Persepsi Integritas	90,45
			10b-CP	Persentase penyelesaian program transformasi digital	80%
	11	Sistem informasi manajemen yang andal	11a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%
	12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	90%
			12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat BPPK



AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Strategis

A. Capaian Renstra

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya, Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan, serta Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

Capaian target kinerja kegiatan BPPK Tahun 2019 dapat tergambarkan dalam target dan realisasi Renstra BPPK Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2019

NO	Indikator	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	TargetTahun 2019	Realisasi Tahun 2019
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara				
	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	70	91,53	90	-
	Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan	4.2500%	5,7552%	4.50	-
	Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik	90%	95,52%	92.00	95,52%

B. Capaian Kinerja

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem manajemen IKU di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan, yaitu:

- 1) Kemenkeu-Wide : Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)
- 2) Kemenkeu-One : Level Unit Eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)
- 3) Kemenkeu-Two : Level Unit Eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)
- 4) Kemenkeu-Three : Level Unit Eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)
- 5) Kemenkeu-Four : IKU Pimpinan Unit Eselon IV
- 6) Kemenkeu-Five : IKU Pelaksana, Staf Ahli, TP, Fungsional, Eselon V

Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU digunakan 3 tingkatan warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian yaitu:

- warna merah untuk capaian di bawah 80
- warna kuning untuk capaian $80 \leq x < 100$
- warna hijau untuk capaian $100 \leq x \geq 120$

Pada tahun 2019, dari 18 IKU terdapat seluruhnya berstatus hijau.



110,66%

GRAFIK 3.1 NKO
Tahun 2012-2015

o

A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

A. Capaian Renstra

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya, Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan, serta Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

Capaian target kinerja kegiatan BPPK Tahun 2019 dapat tergambarkan dalam target dan realisasi Renstra BPPK Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2019

NO	Indikator	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara				
	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	70	91,53	90	96,03
	Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan	4.2500%	5,7552%	4.50	4,74
	Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik	90%	95,52%	92.00	95,47%

B. Capaian Kinerja

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem manajemen IKU di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan, yaitu:

- 1) *Kemenkeu-Wide* : Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)
- 2) *Kemenkeu-One* : Level Unit Eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)
- 3) *Kemenkeu-Two* : Level Unit Eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)
- 4) *Kemenkeu-Three* : Level Unit Eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)
- 5) *Kemenkeu-Four* : IKU Pimpinan Unit Eselon IV
- 6) *Kemenkeu-Five* : IKU Pelaksana, Staf Ahli, TP, Fungsional, Eselon V

Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU digunakan 3 tingkatan warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian yaitu:

- warna merah untuk capaian di bawah 80
- warna kuning untuk capaian $80 \leq x < 100$

- warna hijau untuk capaian $100 \leq x \leq 120$

Pada periode pengukuran Triwulan III Tahun Anggaran 2019, dari 18 IKU seluruh IKU berstatus hijau. Target, realisasi, dan capaian IKU BPPK Tahun 2019, secara rinci disajikan dalam Tabel 3.2 halaman berikut..

Tabel 3.2
Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK Tahun 2019

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)</i>				106,7
1	SDM yang berkinerja tinggi			106,7
1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	96,03%	106,7
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE (15%)</i>				109,79
2	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan			111,84
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	75%	99,78%	120
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	92%	95,38%	103,67
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			107,74
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,39	4,73	112,66
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)</i>				113,21
4	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi			100
4a-N	Persentase pengembangan <i>Instructional System Design</i>	100%	100%	100
5	Program pembelajaran yang kreatif			120
5a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	30%	49,55%	120
6	Manajemen pengetahuan yang berkualitas			117,26
6a-N	Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	114,52%	114,52
6b-N	Indeks kualitas penelitian	50	98	120
7	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan			120
7a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	100%	120
8	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif			108,8
8a-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%	100
8b-N	Indeks pemenuhan standar mutu	3	3	120
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)</i>				111,5
9	SDM yang kompeten			109,81
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	94%	97,47%	103,69
9b-N	Persentase proses penempatan talent pada jabatan target	80%	92,75%	115,94
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>			110,39
10a-CP	Indeks Persepsi Integritas	90,45	91,64	101,32
10b-CP	Persentase penyelesaian program transformasi digital	80%	99,91%	120

11	Sistem informasi manajemen yang andal			120
11a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0%	120
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			106,12
12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA15 yang telah ditindaklanjuti	90%	86,89%	109,11
12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,48%	104,72
Nilai Kinerja Organisasi				110,66

Sumber : CKP BPPK Tahun 2019, Bagian OTL Sekretariat Badan

Penjelasan tiap-tiap capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi

IKU SDM yang berkinerja tinggi adalah SDM Kementerian Keuangan berkompetensi tinggi yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

IKU ini merupakan bentuk evaluasi pembelajaran Kirkpatrick level 4 (dampak pelatihan).

Level 1 : mengukur reaksi peserta terhadap pelatihan yang diikuti

Level 2: mengukur tingkat pengetahuan yang didapat peserta pelatihan, pengukuran dilakukan melalui ujian atau pre test dan post test

Level 3: mengukur perubahan perilaku melalui implementasi pengetahuan di tempat kerja

Level 4 : mengukur pencapaian hasil berupa peningkatan kinerja peserta pelatihan

Pengukuran level 4 dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian leading indicator, desired result, isolasi/group control, trend lines dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan 3-5 bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan.

Alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan level 4.

Alumni pelatihan yang dievaluasi adalah alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi Kirkpatrick sampai dengan level 3.

Alumni pelatihan yang diukur harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Indikator keberhasilan level 4 adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.

Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.

Penetapan pelatihan yang akan dievaluasi dan indikator yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran).

Program yang akan dievaluasi pada tahun 2019 adalah:

1. Talent Development Program (Level Basic) Bagi Pegawai DJP (Batch I);
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV (Angkatan II, III, IV);
3. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (Angkatan I Jakarta dan BDK Malang);
4. Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Tingkat Dasar (Angkatan Is.d. V);
5. Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum;
6. Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan BLU;
8. Pelatihan Treasury Management Representative: Recruitment ;
9. Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Pelatihan Teknis Analisis IDLP Dasar;
11. Pelatihan Teknis Manajemen Data dan Informasi;
12. Pelatihan Teknis Manajemen Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
13. Pelatihan Teknis Manajemen Pemeriksaan;
14. Pelatihan Teknis Intelijen Analisis;
15. Pelatihan Teknis Pelayanan Administrasi Manifes;
16. Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Impor;
17. Pelatihan Teknis Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (E-Learning);
18. Pelatihan Kemampuan Menulis Tingkat Dasar untuk Jafung AKPD;
19. Pelatihan Metodologi Survey dan Riset Pasar;
20. Pelatihan Data Engineer
21. Pelatihan DMFAS Tk. Lanjutan: Query Builder;
22. Pelatihan Penyusunan Materi Pembelajaran Berbasis Multimedia.
23. Pelatihan Desain Pembelajaran

Formula:	
Jumlah Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	x100%
Jumlah Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja	

1a-CP Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya

Tujuan IKU ini adalah mengukur keberhasilan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu.

Untuk IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya tersebut belum terdapat realisasi dengan penjelasan sebagai berikut :

BPPK	SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi							
	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (1/2)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-18	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	90%	90%	Max/ TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	96,03%	96,03%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	106,69	106,69	

Penjelasan

IKU ini merupakan bentuk evaluasi pembelajaran Kirkpatrick level 4 (dampak pelatihan). Indikator keberhasilan level 4 adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan, yang diukur dengan membandingkan data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.

Pada tahun 2019 terdapat 23 program pelatihan yang alumennya dievaluasi sampai dengan level 4 Kirkpatrick, dimana dari 629 alumni yang menjadi objek evaluasi, 604 diantaranya menunjukkan peningkatan kinerja dari 629 alumni yang menjadi objek evaluasi, 604 diantaranya menunjukkan peningkatan kinerja

Daftar Pelatihan yang Dievaluasi sampai dengan Kirkpatrick Level 4			
No	Nama Program	Alumni yang dievaluasi	Alumni dg Peningkatan Kinerja
1	Talent Development Program (Level Basic) Bagi Pegawai DJP (Batch I)	74	72
2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV (Angkatan II, III, IV)	49	49
3	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (Angkatan I Jakarta dan BDK Malang)	38	38
4	Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Tingkat Dasar (Angkatan I s.d. V)	59	59
5	Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum	28	27
6	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	10	10
7	Pelatihan Reviu Laporan Keuangan BLU	28	25
8	Pelatihan Treasury Management Representative: Recruitment	61	59
9	Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran	8	8
10	Pelatihan Teknis Analisis IDLP Dasar	6	6
11	Pelatihan Teknis Manajemen Data dan Informasi	28	28

12	Pelatihan Teknis Manajemen Ekstensifikasi dan Penyuluhan	52	43
13	Pelatihan Teknis Manajemen Pemeriksaan	19	18
14	Pelatihan Teknis Intelijen Analis	21	19
15	Pelatihan Teknis Pelayanan Administrasi Manifes	14	12
16	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Impor	21	20
17	Pelatihan Teknis Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (E-Learning)	6	5
18	Pelatihan Kemampuan Menulis Tingkat Dasar untuk Jafung AKPD	7	7
19	Pelatihan Metodologi Survey dan Riset Pasar	10	9
20	Pelatihan Data Engineer	27	27
21	Pelatihan DMFAS Tk Lanjutan	13	13
22	Pelatihan Penyusunan Materi Pembelajaran Berbasis Multimedia	42	42
23	Pelatihan Desain Pembelajaran	8	8
	TOTAL	629	604

SS/IKU	Persentase alumni yang meningkat kinerjanya
IS	Pelaksanaan Program Pelatihan Pengelolaan Dana Desa
Periode IS	Januari s.d. Desember 2019
Output	2.400 peserta pelatihan - Nilai Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa (target 23 poin) 2 Desa Percontohan

Progres s.d. Triwulan IV	Status: Selesai
Penjelasan - Realisasi peserta sebesar 2.432 dengan rincian sebagai berikut: - Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa sebanyak 628 peserta. - Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebanyak 613 peserta. - Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Desa sebanyak 598 peserta - Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM desa sebanyak 593 peserta. - Sebaran peserta berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: - Provinsi Aceh sebanyak 1.082 peserta. - Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 822 peserta. - Provinsi Maluku sebanyak 297 peserta. - Provinsi Papua sebanyak 231 peserta.	

Kendala/Akar Masalah

1. Keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa membiayai *full costing* SPD Peserta.
2. Sulitnya akses komunikasi penyampaian surat pemanggilan ke desa.
3. Terbatasnya sarana transportasi dari desa menuju lokasi pelatihan.

Progres s.d. Triwulan IV

Output

1. Dari 2.400 peserta yang direncanakan mengikuti pelatihan sampai dengan Triwulan IV, terealisasi sebesar 2.432 peserta (101.33%).
2. Nilai Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 24,45 poin
3. Telah dibentuk 4 Desa Percontohan, yaitu
 - a. Desa Bakau Hulu Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh
 - b. Desa Paoh Benua Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
 - c. Desa Pinang Luar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
 - d. Desa Wakasihu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

Perkembangan IKU Ini dari tahun ke tahun

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	N/A	N/A	70%	91,53%	90%	96,03%

2. Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan

Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan adalah lulusan yang mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2a-N Persentase Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja

IKU ini merupakan hasil dari Evaluasi Kirkpatrick Level 3 (Behavior).

Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat serta disepakati dengan unit pengguna. Program pelatihan yang akan dievaluasi ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran).

Responden dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran adalah alumni pelatihan, atasan, rekan kerja, bawahan (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°. Responden yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360° adalah apabila jumlah tanggapan responden atas seorang alumni pelatihan minimal memenuhi 50% dari jumlah responden yang disurvei.

Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilakukan pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta;
- b. berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi pembelajaran; dan
- c. melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diikuti.

Alumni yang memenuhi standar kompetensi pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta adalah apabila alumni tersebut berhasil lulus ujian dengan nilai minimal baik atau berhasil mendapat peningkatan nilai dalam pre-test dan post-test. Alumni yang berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri adalah apabila alumni tersebut mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,40 (dengan skala interval 1-5) atas seluruh pertanyaan yang menggunakan skala berdasarkan form Asesmen Mandiri (Kepercayaan Diri, Komitmen, dan Perilaku) sesuai dengan PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Alumni yang melaksanakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran dibuktikan berdasarkan hasil rekapitulasi dari jawaban responden atas alumni tersebut atau berdasarkan data tugas dan fungsi dari unit kerja alumni. Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan.

Formula:

$$\begin{aligned} \text{Kualitas} & & \text{Rata-rata dari jawaban alumni x;} \\ \text{Perilaku Kerja} & & \text{Rata-rata dari jawaban atasan alumni x;} \\ \text{Alumni x} & = \text{Rata-rata dari} & \text{Rata-rata dari jawaban rekan kerja alumni x;} \\ & & \text{Rata-rata dari jawaban bawahan alumni x.} \end{aligned}$$

Realisasi IKU

$$= \frac{\text{Jumlah Alumni Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja}}{\text{Jumlah Alumni Pelatihan yang Diukur dalam Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran}} \times 100\%$$

Untuk IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya tersebut belum terdapat realisasi dengan penjelasan sebagai berikut :

BPPK	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan							
	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	75%	75%	Max / TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	99,78%	99,78%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	132,96	132,96	

Perkembangan IKU Ini dari tahun ke tahun

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-	-
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	99,78%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	99,78%

2b-N Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal Baik

Lulusan berpredikat minimal baik adalah:

- lulusan pelatihan teknis yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama
- lulusan pelatihan dasar dan kepemimpinan yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama (bukan peserta mengulang)
- lulusan program diploma yang memperoleh IPK minimal 3,25
- lulusan program pre-departure training yang memperoleh nilai IBT minimal 79 atau IELTS 6,5

Pembagi dalam IKU ini adalah seluruh peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti ujian. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat dalam memberikan umpan balik kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.

Formula:	
Jumlah peserta/mahasiswa yang lulus ujian dengan predikat minimal baik	x
Jumlah peserta/mahasiswa yang mengikuti ujian	100%

Capaian IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut :

BPPK	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan							
	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max / TLKV
Realisasi	97,75%	96,50%	96,50%	95,52%	95,52%	95,38%	95,38%	
Capaian	104,08	104,90	104,90	103,83	103,83	103,67	103,67	

Penjelasan
Sepanjang tahun 2019, dari 21.708 peserta pelatihan yang mengikuti ujian, 20.766 (95,66%) diantaranya lulus dengan predikat minimal baik. Sementara dari 4.516 mahasiswa program diploma PKN STAN, 4.247 (94,04%) diantaranya lulus dengan IPK $\geq 3,25$.

Akar Masalah
1. Ketidaksesuaian antara jumlah materi yang diberikan oleh pengajar dengan alokasi waktu yang diberikan (Pelatihan Teknis Analisis IDLP Dasar) 2. Beberapa peserta tidak menyelesaikan <i>action learning</i> yang ditugaskan (Pelatihan Menulis Untuk Media Massa serta Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia)
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
▪ Review atas Kerangka Acuan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran dan Kerangka Naskah Soal. ▪ Penyempurnaan Kerangka Acuan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran dan Kerangka Naskah Soal

SS/IKU	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik
IS	Pelatihan perpajakan di bidang Ekonomi Digital
Periode IS	Januari s.d Desember 2019
Output	210 peserta

Progres s.d. Triwulan IV	Selesai
Kendala yang Dihadapi 1. Kesulitan mencari pembicara praktisi atau pelaku bisnis Ekonomi Digital karena ketakutan atas tema Pajak yg akan dibahas, apabila bersedia pembicara cenderung tertutup dalam menyampaikan materi terkait Ekonomi Digital. 2. Kesulitan dalam menentukan fokus dan pembahasan dalam kurikulum pelatihan karena luasnya ruang lingkup ekonomi digital 3. Kurangnya dukungan peraturan pelaksana untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak pelaku ekonomi digital.	
Output ➤ Realisasi peserta sebanyak 305 peserta dengan rincian sebagai berikut: a. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital IBFD-CapaBuild sebanyak 50 orang b. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan I sebanyak 55 orang c. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan II sebanyak 27 orang d. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan III sebanyak 29 orang e. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan IV sebanyak 28 orang f. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan V sebanyak 29 orang g. Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan VI sebanyak 32 orang h. Lokakarya Penggalan Potensi Pajak Usaha Perdagangan: E-Commerce untuk Account	

Representatives sebanyak 55 orang	
➤ Pengukuran Peningkatan Kompetensi	
a. Telah dilakukan pengukuran peningkatan kompetensi peserta Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan I s.d. VI melalui pre-test dan post-test dan diperoleh hasil peningkatan sebesar 27,04 dari target sebesar 23.	
b. Pengukuran peningkatan kompetensi Pelatihan Teknis Ekonomi Digital IBFD-CapaBuild dilakukan dengan menggunakan mekanisme survey dan kuesioner dengan rata-rata indeks kenaikan kompetensi sebesar 2,97 (dengan konversi angka menjadi 29,7 dari target 23)	
c. Pengukuran peningkatan kompetensi untuk Lokakarya Penggalan Potensi Pajak Usaha Perdagangan: E-Commerce untuk Account Representatives dilakukan melalui mekanisme laporan action plan dengan melihat potensi pajak yang didapatkan dari WP Pelaku Ekonomi Digital oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode action plan sebagai persiapan (pilot project) penerapan pendekatan pembelajaran 10:20:70 (integrated learning)	
Anggaran	
Pagu	Realisasi
Rp 473.100.000	Rp 207.959.270
Rencana Aksi	Penanggung jawab
Untuk tahun 2020, telah dirumuskan pelatihan ekonomi digital yang bekerjasama dengan IBFD-Capabuild dan OECD	Pusdiklat Pajak

SS/IKU	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik
IS	Pelatihan Kepabeaan dan Cukai di Bidang Penanganan Kejahatan Lintas Negara
Periode IS	Maret s.d. September 2019
Output	150 peserta

Progres s.d. Triwulan IV	Status: Selesai	
Penjelasan Pada tahun 2019 Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyusun desain pembelajaran dan menyelenggarakan dua angkatan Pelatihan Transnational Organized Crimes dan tiga angkatan Lokakarya Transnational Organized Crimes Kendala/Akar Masalah Lokakarya Transnational Organized Crimes Angkatan II yang semula direncanakan akan diikuti oleh 30 peserta, namun hanya diikuti oleh 22 peserta. Dari target 20 orang peserta dari luar negeri, realisasinya hanya 11. Beberapa negara tidak dapat mengirimkan peserta dikarenakan efisiensi anggaran dan 1 negara membatalkan keberangkatan menjelang pembukaan lokakarya karena kendala administrasi. Sehingga untuk mencapai target output		

yang telah ditetapkan maka kapasitas peserta pada Lokakarya Transnational Organized Crimes Angkatan III ditambah dari semula direncanakan sebanyak 30 peserta menjadi 40 peserta.

Output

Peserta terealisasi sebanyak 152 peserta dari 150 peserta yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Teknis Transnational Organized Crimes Angkatan I (30 orang);
2. Pelatihan Teknis Transnational Organized Crimes Angkatan II (30 orang);
3. Lokakarya Transnational Organized Crimes Angkatan I (30 orang);
4. Transnational Organized Crimes Workshop (International) (22 orang)
5. Lokakarya Transnational Organized Crimes Angkatan II (40 orang).

Anggaran	
Pagu	Realisasi
Rp 601.503.000	Rp 496.087.780

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat dalam memberikan umpan balik kepada BPPK dalam memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.

Formula:		
Jumlah peserta/mahasiswa yang lulus ujian dengan predikat minimal baik		x 100%
Jumlah peserta/mahasiswa yang mengikuti ujian		

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	90%	94,05%	92%	97,75%
Triwulan II	-	-	90%	94,19%	92%	96,50%
Triwulan III	-	-	90%	93,88%	92%	95,52%
Triwulan IV	-	-	90%	95,50%	92%	95,38%
Tahunan	N/A	N/A	90%	95,50%	92%	95,38%

3. Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna BPPK dalam mendapatkan layanan BPPK di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan. Kepuasan pengguna layanan diukur berdasarkan hasil survei pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. Lingkup survei adalah pengguna eksternal atas pelayanan unggulan BPPK.

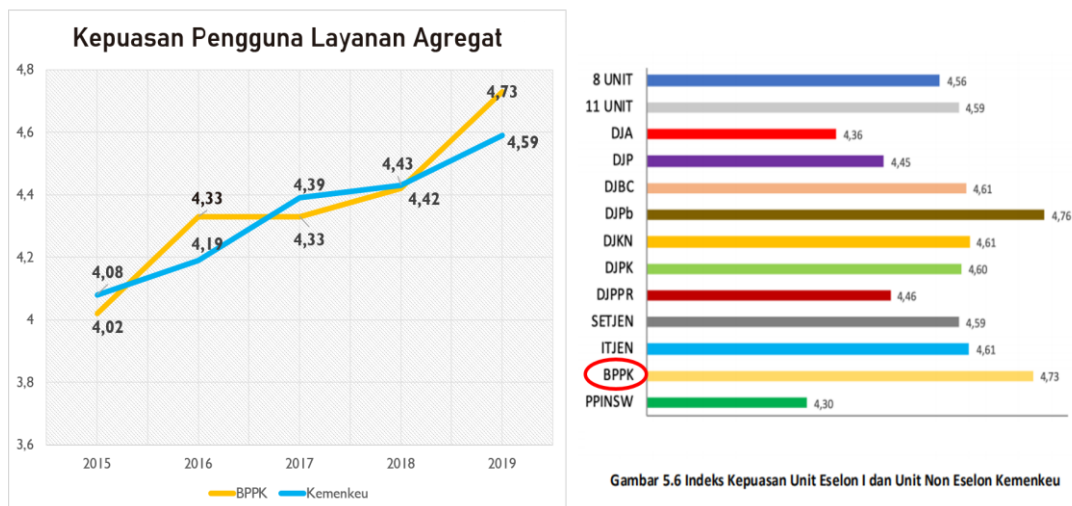
IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh Pusdiklat, PKN STAN dan BDK yang diperoleh dari survei independen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bekerjasama dengan Tim Peneliti independen. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK.

Formula:
Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan

Capaian IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut.

BPPK	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	4,39	4,39	Max/ TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	4,73	4,73	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107,74	107,74	

SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN



Gambar 5.6 Indeks Kepuasan Unit Eselon I dan Unit Non Eselon Kemenkeu

Penjelasan

Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh pusdiklat, PKN STAN, dan Balai Diklat yang diperoleh melalui survei independen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bekerja sama dengan tim peneliti independen.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Mensosialisasikan hasil capaian tersebut pada saat rakor BPPK di Pekanbaru untuk ditindaklanjuti dengan semakin memperbaiki perencanaan pelayanan sehingga capaian yang telah baik ini dapat dipertahankan di tahun 2020. 2. Mengusulkan objek layanan baru untuk disurvei yaitu sertifikasi/akreditasi.

Perkembangan IKU dari Tahun Ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-	-
Triwulan IV	4,12	4,33	4,33	4,42	4,39	4,73
Tahunan	4,12	4,33	4,33	4,42	4,39	4,73

4. Perencanaan Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Perencanaan Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi adalah perumusan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang selaras dengan kriteria pembelajaran Corpu, yaitu Relevant, Accessible, Impactful dan Applicable serta sesuai dengan pedoman pembelajaran yang berlaku.

4.a-N Persentase pengembangan Instructional System Design

ISD yang dimaksud dalam IKU ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nomor:Per-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu meliputi:

Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran adalah informasi program pembelajaran yang memuat deskripsi singkat, standar kompetensi, kompetensi dasar, lama pembelajaran efektif, daftar mata pelajaran, jenjang, persyaratan peserta, kualifikasi fasilitator, bentuk evaluasi, dan akomodasi.

Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata pelajaran yang disusun secara sistemik dan mencakup nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media serta sumber bahan.

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) adalah rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematis dan mencakup nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan

pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan, tahapan kegiatan Pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.

Kerangka Naskah Soal (KNS) adalah suatu dokumen yang memuat informasi mengenai komposisi, bentuk, dan jumlah soal yang akan digunakan dalam menyusun Rancangan Naskah Soal menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai pedoman penyusunan soal dan validasi soal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Jumlah program yang dimaksud dalam IKU ini adalah :

- seluruh program pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2019;
- belum memiliki ISD/mengalami perubahan kurikulum.

Program tersebut dikatakan telah lengkap ISD-nya apabila:

- Untuk pelatihan hasil AKP reguler, wajib tersedia : KAP, GBPP, SAP, dan KNS
- Untuk pelatihan hasil AKP insidental di tengah tahun, paling kurang tersedia : KAP
- Untuk pelatihan e-learning, seminar, kursus, penataran, lokakarya/workshop paling kurang tersedia: KAP.

IKU ini bertujuan untuk memastikan agar program-program pembelajaran yang diselenggarakan BPPK memiliki struktur desain pembelajaran yang jelas dan mengarah kepada pencapaian kompetensi khususnya dalam mewujudkan Kementerian Keuangan Corporate University.

Formula:		
	Jumlah program dengan ISD lengkap	x 100%
	Jumlah program	

Untuk IKU Persentase pengembangan Instructional System Design, capaian melampaui target yang ditetapkan.

BPPK	Perencanaan dan perumusan kebijakan yang berkualitas tinggi							
	Persentase konversi kurikulum pelatihan ke dalam <i>Instructional System Design</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-18	Pol/ K P
Target	21,28%	47,34%	47,34%	81,38%	81,38%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi	26,22	50,99%	50,99%	78,32%	78,32%	100%	100%	
Capaian	123,23	107,70	107,70	96,24	96,24	100	100	

Penjelasan

IKU ini bertujuan untuk memastikan agar program-program pembelajaran yang diselenggarakan BPPK memiliki struktur desain pembelajaran yang jelas dan mengarah kepada pencapaian kompetensi khususnya dalam mewujudkan Kementerian Keuangan Corporate University. Sepanjang tahun 2019, dari 414 program pelatihan yang diselenggarakan BPPK, seluruhnya telah dilengkapi dengan ISD.

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-		35%	44,73%	21,28%	26,22%
Triwulan II	35%		35%	44,73%	47,34%	50,88%
Triwulan III	-		35%	65,51%	81,38%	78,32%
Triwulan IV	70,30%		70,30%	83,36%	100%	100%
Tahunan	70,30%		100%	83,36%	100%	100%

5, Program pembelajaran yang kreatif

Proses pembelajaran yang kreatif adalah proses pembelajaran yang didesign dan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik.

5a-N Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital

Program pelatihan yang diselenggarakan BPPK terdiri dari program pelatihan klasikal (full tatap muka), blended learning, dan fully e-learning. Jumlah program mengacu pada kalender pelatihan terbaru. Program e-learning yang dimaksud dalam IKU ini adalah seluruh program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK secara fully e-learning, termasuk microlearning, sepanjang tahun 2019. Peserta pelatihan adalah seluruh peserta pelatihan sepanjang tahun 2019 yang berasal dari Kementerian Keuangan. Peserta program e-learning adalah seluruh peserta dari Kementerian Keuangan yang menyelesaikan program fully e-learning.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur kesiapan BPPK dalam mendukung transformasi digital Kementerian Keuangan serta tingkat aksesibilitas dan cakupan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK.

Formula:

Realisasi =

$$\frac{\text{jumlah program e-learning yang diselenggarakan}}{\text{jumlah seluruh program yang diselenggarakan}} \times 60\% + \frac{\text{jumlah peserta program e-learning yang diselenggarakan}}{\text{jumlah seluruh peserta pelatihan}} \times 40\%$$

Realisasi IKU Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital adalah sebagai berikut:

BPPK	Program pembelajaran yang kreatif							
	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-18	Pol/ KP
Target	-	8%	8%	-	30%	30%	30%	Max/ TLKV
Realisasi	-	13,63%	13,63%	-	30,71%	49,55%	49,55%	
Capaian	N/A	170,37	170,37	N/A	383,91	165,16	165,16	

Isu Utama dan Implikasi
Isu Utama: Tingginya beban server KLC pada saat penyelenggaraan <i>e-learning</i> kode etik yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkeu. Implikasi: Terdapat risiko kendala server pada saat penyelenggaraan <i>e-learning</i>.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Penetapan Peraturan Kepala Badan Nomor PER-2/PP/2019 tentang Pedoman e-Learning di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 27 Juni 2019 2. Sedang dilakukan pengembangan KLC versi 2.0 3. Penyesuaian topologi server untuk mendukung kelancaran pelaksanaan e-learning. 4. Sedang dilakukan proses pengadaan server tambahan.

Akar Masalah
Tingginya jumlah <i>concurrent users</i> yang mengikuti e-learning.

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	8%	13,63%
Triwulan III	-	-	-	-	30%	30,71%
Triwulan IV	-	-	-	-	30%	49,55%
Tahunan	-	-	-	-	30%	49,55%

6, Manajemen pengetahuan yang berkualitas

Manajemen pengetahuan yang berkualitas adalah penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka penguatan kelembagaan.

6.a-N Tingkat pemanfaatan Knowledge pada platform KLC

Kemenkeu Learning Center (KLC) merupakan media pembelajaran online yang berisi berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum.

KLC diakses melalui laman <https://klc.kemenkeu.go.id>.

Knowledge yang diukur pemanfaatannya dalam IKU ini adalah seluruh materi/knowledge document yang ada pada menu knowledge center. IKU ini diukur melalui tiga aspek, yaitu efektivitas pengelolaan Community of Practice, user engagement, dan kualitas konten.

- Pengelolaan Community of Practice (CoP), diukur berdasarkan jumlah lesson learned dari CoP yang aktif dikelola oleh BPPK. CoP dikatakan aktif apabila memiliki setidaknya satu dokumentasi lesson learned yang diunggah ke KLC Target untuk setiap Pusdiklat adalah 10 lesson learned dari 3 CoP aktif
- User engagement, diukur berdasarkan bounce rate KLC dan jumlah unique pageviews.
- Kualitas konten diukur berdasarkan rata-rata rating yang diberikan oleh pengunjung terhadap konten yang ada di menu knowledge center yang telah mendapatkan penilaian/rating minimal 20 kali. IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemanfaatan knowledge document/materi pembelajaran di bidang Keuangan Negara pada KLC.

Formula:

a. Pengelolaan CoP = rata-rata Indeks Pengelolaan CoP di Pusdiklat

Indeks	Uraian (untuk tiap Pusdiklat)
110	>10 lesson learned dari 3 CoP
100	10 lesson learned dari 3 CoP
95	8-9 lesson learned dari 3 CoP
90	8-9 lesson learned dari 2 CoP
85	5-7 lesson learned dari 3 CoP
80	5-7 lesson learned dari 2 CoP
70	<5 lesson learned

$$a. \text{ Bounce rate} = 1 + \frac{1 - \text{realisasi bounce rate}}{\text{target bounce rate}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Unique pageview atas konten knowledg} = \frac{\text{jumlah unique pageview}}{198,750}$$

$$d, \text{ Kualitas konten} = \frac{\text{Rata - rata rating knowledge document}}{4}$$

$$\text{Formula IKU} = \frac{(20\% \times a) + (10\% \times b) + (30\% \times c) + (40\% \times d)}{\text{Rata - rata rating knowledge document}}$$

Persentase pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC adalah sebagai berikut :

316,520	Proses pembelajaran yang kreatif							
	Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-18	Pol/ KP
Target	49,33%	73,00%	73,00%	88,83%	88,83%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi	68,14%	92,95%	92,95%	100,80%	100,80%	114,52%	114,52%	
Capaian	138,13	127,33	127,33	113,48	113,48	113,48	113,48	

Penjelasan							
No	Uraian	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Indeks Capaian	
1	Bounce rate	10%	30%	33,43%	88,57%	8,86%	
2	Unique pageview	30%	268.000	786.144	120%	36,00%	
3	Rating konten	40%	4	4,87	120%	48,00%	
4	Pengelolaan Community of Practice (CoP)	20%	100 (indeks)	108,33 poin	108,33%	21,67%	
Realisasi IKU						114,52%	

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	49%	68,14%
Triwulan II	-	-	-	-	73%	92,95%
Triwulan III	-	-	-	-	89%	100,80%
Triwulan IV	-	-	-	-	100%	114,52%
Tahunan	-	-	-	-	100%	114,52%

6b-N Indeks kualitas penelitian

Riset atau penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Indeks kualitas penelitian adalah nilai seluruh penelitian PKN STAN yang terpublikasi pada tahun 2019 berdasarkan bobot/formula yang ada di bawah.

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan yang didesain dan diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensiSDMKementerian Keuangan.

Formula:	
Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (scopus, thomson, & Microsoft Academic Search)	7
Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, Ebsco, Proquest atau sejenisnya)	5
Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti	3
Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks scopus	2
Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN	1
Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	0,5

Persentase Indeks kualitas penelitian adalah sebagai berikut :

BPPK	Manajemen pengetahuan yang berkualitas							
	Indeks kualitas penelitian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	50	50	Max / TLKV
Realisasi	-	38	38	45	45	98	98	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	196	196	

Penjelasan			
S sepanjang tahun 2019, terdapat 20 penelitian di lingkungan PKN STAN yang sudah dipublikasikan, dengan rincian sebagai berikut:			
Kriteria	Indeks	Jum	Nilai
Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (scopus, thomson, & Microsoft Academic Search)	7	9	63
Penelitian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sedang (DOAJ, Ebsco, Proquest atau sejenisnya)	5	2	10
Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi Dikti	3	8	24
Penelitian dipublikasikan di prosiding terindeks scopus	2	-	-
Penelitian dipublikasikan di jurnal nasional yang memiliki ISSN	1	1	1
Penelitian diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	0,5	-	-
TOTAL		20	98

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	-	-	-	-	50	98

7, Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan

Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan adalah proses pengakuan kompetensi di Bidang Keuangan Negara yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi, sesuai dengan kebutuhan unit pengguna .

7a-N Persentase kualitas implementasi program sertifikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi. Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4. Peserta dinyatakan puas apabila menilai ≥ 3 pada minimal 50% aspek yang dinilai. Aspek layanan yang dinilai meliputi:

1. Penyampaian informasi terkait penyelenggaraan ujian;

2. Kesesuaian prosedur pendaftaran dengan SOP/pengumuman prosedur;
3. Kelayakan tempat ujian;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Profesionalitas petugas.

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi diselenggarakan sesuai janji layanan dan ketentuan yang berlaku.

Persentase program pelatihan yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut:

BPPK	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan							
	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	70%	70%	Max/ TLKV
Realisasi	-	-	-	90%	90%	100%	100%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	142,86	142,86	

Penjelasan
1. IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi. 2. Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4. 3. Pada tahun 2019, program sertifikasi dilaksanakan pada sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA), dimana seluruh peserta menyatakan puas dan penyelenggaraan dilakukan sesuai dengan pedoman.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Penyelenggaraan pelatihan bagi calon <i>assessor</i> uji kompetensi JFAA.		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Penyelenggaraan uji kompetensi sesuai pedoman dan janji layanan	BPPK	2020

Formula:
$\left(\frac{\text{jumlah peserta yang puas}}{\text{jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi}} \times 40\% \right) +$ $(\text{tingkat kesesuaian tahapan penyelenggaraan sertifikasi} \times 60\%)$

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	-	-	-	-	70%	100%

8, Program yang akomodatif

Program yang akomodatif adalah program pendidikan dan pelatihan yang didesign sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan dan selalu diupdate berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan serta evaluasi hasil pelatihan.

8a-N Persentase Program Pelatihan yang Mendapatkan Nilai Validasi A.

Program pelatihan adalah serangkaian materi, metode dan media yang dihasilkan dari proses penyusunan desain pembelajaran yang didasarkan pada hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I.

Validasi pelatihan adalah pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pelatihan dan materi pelatihan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Program pelatihan yang divalidasi adalah Program pelatihan hasil rancangan Pusdiklat. Program pelatihan yang mendapat nilai validasi A adalah jika nilai tiap komponen mendapatkan nilai minimal 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai kurang dari 3 dan dinyatakan tervalidasi baik sekali. Kategori Penilaian berdasarkan hasil penilaian Tim Validasi Program pelatihan. Tim Validasi Program Pelatihan terdiri dari pihak internal dan eksternal BPPK. Validasi yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nomor:Per-6/PP/2011 tentang Pedoman Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelatihan yang diselenggarakan. Kualitas suatu pelatihan dapat dilihat dari tingkat efektivitas pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menutup kesenjangan kompetensi teknis tertentu. IKU ini bermanfaat untuk menjadi dasar dalam capacity building bagi SDM perancang pelatihan maupun dasar perbaikan sistem dan mekanisme perancangan pelatihan di BPPK.

Persentase program pelatihan yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut:

BPPK	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif							
	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLKV
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	N/A	100	100	100	100	100	100	

Penjelasan
- IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas desain program pelatihan yang diselenggarakan BPPK. - Validasi pelatihan adalah pengesahan terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pelatihan dan materi pelatihan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut. - Program pelatihan yang mendapat nilai validasi A adalah jika nilai tiap komponen mendapatkan nilai minimal 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai kurang dari 3 dan dinyatakan tervalidasi baik sekali. - Tim Validasi Program Pelatihan terdiri dari internal BPPK dan eksternal (Universitas Negeri Jakarta). - Pada tahun 2019, dari 57 program pelatihan yang divalidasi, semuanya mendapat nilai validasi A.
Formula:
$\frac{\text{Jumlah program pelatihan yang mendapat nilai validasi A}}{\text{Jumlah program pelatihan yang divalidasi}} \times 100\%$

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	100%
Triwulan II	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Triwulan III	-	-	-	-	-	100%
Triwulan IV	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BPPK	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif							
	Indeks pemenuhan standar mutu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ KP
Target	-	3	3	-	3	3	3	Max / TLKV
Realisasi	-	3	3	-	3	4	4	
Capaian	N/A	100	100	N/A	100	133,33	133,33	

Isu Utama dan Implikasi		
Unit teknis di BPPK menilai bahwa standar mutu yang telah ditetapkan masih perlu disempurnakan		
Akar Masalah		
Standar mutu dinilai perlu lebih menyentuh substansi, tidak hanya menilai kesesuaian prosedur dan dokumen.		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Review penyempurnaan pedoman standar mutu	Sekretariat Badan	Semester I 2020

9. SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

9a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah pejabat di lingkungan BPPK yang mempunyai tingkat kesesuaian kompetensi jabatan minimal 74%. Kompetensi yang diukur dalam IKU ini adalah kompetensi manajerial. Dikecualikan dalam perhitungan adalah pejabat yang memasuki batas Usia Pensiun (BUP). IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan SDMBPPK dengan Sekretariat Badan melalui penempatan pejabat yang kompeten. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah sebagai berikut::

BPPK	SDM yang kompeten							
	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ KP
Target	-	94%	94%	-	94%	94%	94%	Max / TLKV
Realisasi	91,25%	91,88%	91,88%	93.04%	93.04%	97,47%	97,47%	
Capaian	N/A	97,74	97,74	N/A	98,98	103,69	103,69	

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	90%	93,60%	94%		94%	91,88%
Triwulan III	-	-	-	-	-	93.04%
Triwulan IV	90%	93,14%	94%		94%	97,47%
Tahunan	90%	93,14%	94%		94%	97,47%

Penjelasan

Dari 158 pejabat aktif di lingkungan BPPK, semuanya telah di-assess.

Dari hasil assessment tersebut, jumlah pejabat dengan JPM (Job Person Match) $\geq 74\%$ adalah sebanyak 154 pejabat.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Pemberian Feedback kepada pejabat, prioritas feedback yang telah dilakukan adalah pejabat yang masih berada pada nilai JPM <75%; a. Dalam pelaksanaan Feedback, terlebih dahulu assessor memberikan pemahaman kepada atasan langsung dari asesse terkait urgensi pelaksanaan <i>feedback</i> serta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait Laporan Hasil <i>Assessment Center</i> (LHAC) bawahannya; b. Assessor melakukan feedback kepada asesse dengan memberikan penjelasan LHACnya, kemudian melakukan pendampingan untuk membuat rencana pengembangan untuk membantu memenuhi gap kompetensinya. 2. Coaching dan special assignment oleh atasan langsung. 3. Menugaskan pejabat untuk mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi 4. Sosialisasi mengenai kamus dan standar kompetensi jabatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kompetensi yang diharapkan di tiap jabatan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan monitoring terhadap realisasi rencana pengembangan kompetensi pegawai yang telah mengikuti kegiatan feedback;	Bagian Kepegawaian - Sekretariat Badan	Smt I 2020
Formula		
$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan}}{\text{Jumlah Pejabat yang telah mengikuti assessment}} \times 100\%$		

9b-N Persentase Penempatan Talent pada Jabatan Target

Persentase Proses Penempatan Talent pada Jabatan Target adalah penyelesaian penetapan Talent untuk Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Eselon V yang terdiri dari tahapan atas kegiatan-kegiatan dalam proses Manajemen Talenta yaitu Pemetaan Pejabat/pegawai, Seleksi Rekam Jejak dan Integritas, Seleksi Administrasi, Konfirmasi Calon Talent, Penetapan Talent, Pengembangan dan Evaluasi Talent, dan Penempatan Talent pada Jabatan Target. Untuk mendukung kesuksesan pengisian Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Eselon V sebagai jabatan target yang diisi dari Talent.

Formula:	
Kegiatan	Bobot
a. Penetapan Aturan Manajemen Talenta Unit	15%
b. Pemetaan Pejabat/Pegawai	10%
c. Seleksi Rekam Jejak, Integritas, dan Administrasi	15%

d. Konfirmasi Calon Talent	10%
e. Forum Pimpinan	20%
f. Penetapan <i>Talent</i>	10%
g. Pengembangan dan Evaluasi <i>Talent</i>	15%
h. Penempatan talent pada jabatan target	5%
	100%

Persentase proses penempatan talent pada jabatan target adalah sebagai berikut:

BPPK	SDM yang kompeten							
	Persentase proses penempatan talent pada jabatan target							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	40%	80%	80%	Max / TLKV
Realisasi	40%	80%	80%		80%	92,75%	92,75%	
Capaian	N/A	200	200	N/A	200	115,94	115,94	

Isu Utama dan Implikasi
Isu Utama Analisis kebutuhan talent belum dilakukan berdasarkan analisis rasio karena belum tersedia jabatan target yang pasti. Implikasi Pada tahun 2019 penetapan talent dilakukan berdasarkan prediksi akan kebutuhan talent dengan melihat kemungkinan jabatan target yang akan kosong. Oleh karena itu, kemungkinan sebagian talent tidak akan menduduki jabatan target ataupun tertunda untuk promosi jabatannya sampai dengan ada jabatan kosong yang tersedia.
Akar Masalah
Proses penataan organisasi dan delayering yang sedang berjalan sehingga struktur organisasi BPPK pun masih belum dapat dipastikan sehingga BPPK mengalami kesulitan dalam menentukan jabatan target.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
• Penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor 9/PP/2018 tentang Manajemen Talenta di lingkungan BPPK; • Penetapan Talent BPPK tahun 2019 untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-79/PP/2019; • Formulasi dan penyusunan program pengembangan Talent untuk talent BPPK yang telah ditetapkan pada tahun 2019 bekerja sama dengan Pusdiklat PSDM; • Pelaksanaan Program Pengembangan Talent (Talent Development Program) untuk Talent Jabatan Administrator dan Talent Jabatan Pengawas di lingkungan BPPK; • Pelaksanaan evaluasi pasca program pengembangan talent.

Rekomendasi Rencana Aksi	p jawab	Periode
Pelaksanaan tahapan pengembangan talent tahun 2020 secara komprehensif mulai dari identifikasi talent sampai dengan evaluasi talent.	Sekretariat Badan	2020

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	40%	80%
Triwulan III	-	-	-	-	40%	80%
Triwulan IV	-	-	-	-	80%	92,75%
Tahunan	-	-	-	-	80%	92,75%

10. Organisasi yang fit-for-purpose

Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

10a-CP Indeks Persepsi Integritas

Indeks persepsi integritas (IPI) diperoleh dari hasil Penilaian Persepsi Integritas yang dikembangkan dari Integrity Assessment yang telah dilaksanakan oleh KPK. Metodologi penilaian yang digunakan adalah :

Survei (responden internal dan eksternal);

- Focus Group Discussion (FGD) per zona wilayah yang ditetapkan tim survei Kemenkeu.
- Penilaian Lapangan (Observasi, Wawancara, Reviu Dokumen)

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan budaya integritas Kementerian Keuangan

Formula:
Capaian IKU = (50% xNPI internal) + (50% xNPI eksternal)

Persentase Indeks Persepsi Integritas adalah sebagai berikut:

BPPK	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	Indeks Persepsi Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	90,45	90,45	Max /TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	91,64	91,64	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101,32	101,32	

Penjelasan

Indeks persepsi integritas (IPI) diperoleh dari hasil Penilaian Persepsi Integritas yang dikembangkan dari Integrity Assessment yang telah dilaksanakan oleh KPK.

Metodologi penilaian yang digunakan adalah :

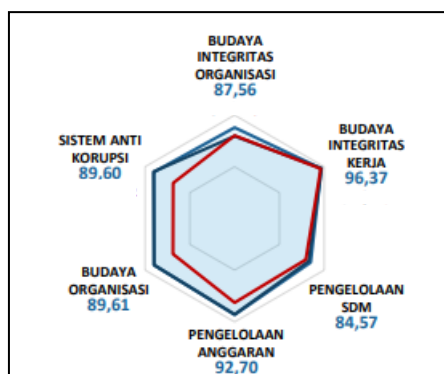
- Survei (responden internal dan eksternal);
- Focus Group Discussion (FGD) per zona wilayah yang ditetapkan tim survei Kementerian Keuangan.
- Penilaian Lapangan (Observasi, Wawancara, Reviu Dokumen).

Area penilaian integritas dilakukan terhadap persepsi/pengalaman internal dan eksternal.

Persepsi/pengalaman internal terdiri atas empat komponen, yaitu:

- Budaya Integritas,
- Sistem Anti Korupsi,
- Pengelolaan SDM,
- dan Pengelolaan Anggaran.

Persepsi/pengalaman eksternal terdiri atas dua komponen, yaitu Budaya Integritas Organisasi dan Budaya Integritas Kerja.



Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- Pemantauan penerapan kode etik;
- Sosialisasi mengenai gratifikasi dan prosedur pelaporannya.

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-	-
Triwulan IV	60	83,92	85	90,45	90,45	91,64
Tahunan	60	83,92	(skala 100)	90,45	90,45	91,64

10b-CP Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0. Enterprise Architecture (EA) sebagai jembatan menuju Transformasi Digital Kemenkeu, yang dilaksanakan secara terus menerus sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Penyusunan blueprint EA dilakukan sampai dengan bulan Mei 2019, sejalan dengan hal dimaksud telah ditetapkan end-state arsitektur proses bisnis dan sistem informasi dalam kerangka EA:

Digital Transformation Initiatives	Unit in Charge
a. New Thinking of Working	Seluruh Unit Es I
b. Implementasi Office Automation	Setjen
c. Modern e-learning	Setjen, BPPK
d. Joint Program Optimalisasi Penerimaan	DJP, DJBC, DJA, DJPB, DJKN, DJPK, Itjen, dan PPINSW
e. Unified Revenue Account Management	DJP
f. Modernisasi Sistem Informasi DJP	DJP, DJBC, DJA, PPINSW
g. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran	DJPB
h. Integrasi Probis Perencanaan dan Penganggaran	DJA, DJPB, DJPK, BKF
i. Penyediaan Data Transaksi Pemda Untuk Kebijakan Fiskal	DJPK

Tujuan IKU ini untuk Memonitor dan memastikan implementasi inisiatif transformasi digital terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas

Formula untuk mengukur capaian Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan sebagai berikut:

Formula:
$\frac{Dur 1}{Total Dur} \times Capaian M 1 + \frac{Dur 2}{Total Dur} \times Capaian M 2 + \dots \frac{Dur n}{Total Dur} \times Capaian M i$
<i>Dur i: Durasi Pelaksanaan Milestone ke i</i> <i>Capaian Mi: Capaian Milestone ke i</i>

Persentase penyelesaian program transformasi digital

BPPK	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	Persentase penyelesaian program transformasi digital							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	11,15%	27,60%	27,60%	29,69%	29,69%	80%	80%	Max / TLKV
Realisasi	18,87%	61,05%	61,05%	79,84%	79,84%	99,91%	99,91%	
Capaian	169,24	221,20	221,20	268,91	268,91	124,89	124,89	

Penjelasan

1. Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu: *The New Thinking of Working*

- Piloting Open Space

Implementasi ABW pada BPPK dilaksanakan pada Sekretariat Badan Gedung B Lt. 4, yang digunakan oleh Bagian OTL dan Bagian TIK. Penggunaan ruang ABW pertama kali pada tanggal 20 Desember 2019 untuk kegiatan Pleno PMO BPPK. Perpindahan pegawai direncanakan dilaksanakan pada akhir Desember 2019.

- Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK)

Telah diselenggarakan e-Learning Persiapan PAK Jenjang Pratama sebanyak 30 angkatan dengan total peserta 887 orang. Pelatihan Persiapan Sertifikasi PAK Jenjang Pratama dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 30 angkatan dengan total peserta 860 orang.

Telah dilakukan sertifikasi PAK periode I pada tanggal 12 s.d. 16 Agustus 2019 di PKN STAN dengan peserta mendaftar sebanyak 58 (dari 92 calon peserta). Sebanyak 42 peserta direkomendasikan kompeten. Sertifikasi PAK periode II pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2019 dengan lokasi asesmen di BDK Medan dan BDK Yogyakarta, serta tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2019 di BPSDM Prov Sulawesi Selatan.

Dari 153 orang pendaftar, 121 orang dinyatakan lolos verifikasi pendaftaran dan berhak mengikuti asesmen. Sebanyak 105 peserta Sertifikasi PAK dinyatakan kompeten oleh LSP KPK

2. Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM

- Pengembangan KLC generasi 2 secara mandiri dengan keunggulan: *adaptive video bitrate*, *course* multi angkatan dan kelas, pencarian canggih (*predictive*), terintegrasi dengan Semantik dan HRIS, *webinar* menggunakan zoom dan *mobile friendly*, adanya pemisahan hak akses antara peserta, pengajar, dan penyelenggara.
- Integrasi SEMANTIK dengan HRIS terkait input *history* pelatihan, data kompetensi, dan penyediaan fitur untuk *e-certificate*.
- Telah diselenggarakan 139 program pelatihan *full e-learning* (beberapa program terdiri dari beberapa angkatan) dengan jumlah peserta sebanyak 142.478 orang, diantaranya termasuk:
 - mandatory e-learning Kode Etik sebanyak 18 angkatan dengan peserta 75.352 orang;
 - mandatory e-learning Cross Function Pengelolaan Keuangan Negara sebanyak 5 angkatan dengan peserta 18.121 orang.
 - Realisasi implementasi full e-learning sebesar 49,46% dari target 30%.

Isu Utama dan Implikasi

1. Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu: *The New Thinking of Working*

Proses pengadaan dan pengerjaan renovasi terlambat karena ruangan masih digunakan. Pengerjaan ABW baru selesai pada pertengahan Desember dan akan digunakan pada akhir tahun sehingga budaya kerja setelah ABW belum dapat dilihat/diamati.

2. Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM

- Terdapat data HRIS yang tidak lengkap sehingga ada field yang kosong/tidak lengkap saat dilakukan pencetakan e-certificate.
- Perbedaan *bandwidth* di masing-masing satker UE1 mempengaruhi kelancaran akses KLC.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Implementasi ABW pada UPT BPPK	Sekretariat BPPK	2020
2. Integrasi HRIS dengan SEMANTIK secara penuh	(koordinator) Sekretariat BPPK	Triwulan III 2020

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	11,15%	18,87%
Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	27,60%	61,05%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	29,69%	79,84%
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	99,91%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	99,91%

11, Sistem Manajemen Informasi yang Andal

Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).

11a Tingkat downtime sistem TIK

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi (berdasarkan BIA tahun 2018) yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: komponen kelistrikan, jaringan DC, perangkat utama (Firewall, DNS, load balancer, server management VM), server/OS, aplikasi, dan basis data. Untuk Unit Setjen ditambahkan komponen jaringan kantor pengguna.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Potensi kerugian finansial;
2. Potensi tuntutan hukum;
3. Citra Kemenkeu; dan
4. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk planned downtime, preventive maintenance, dan downtime diluar waktu layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi High Availability, perhitungan downtime menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Downtime layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Komponen downtime :

1. co-location: server/OS, aplikasi, dan basis data;
2. hosting: aplikasi dan basis data.

Layanan yang dinilai di BPPK adalah layanan pendaftaran ujian saringan masuk PKN STAN.

Tujuan IKU adalah Untuk mengukur ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin.

Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula:	
Realisasi Downtime	$= \sum \left(\frac{\text{Downtime per Komponen Layanan Kritisal}}{\text{Total Waktu Layanan Kritisal}} \right) 100\%$

PersentaseTingkat downtime sistem TIK adalah sebagai berikut:

BPPK	Sistem informasi manajemen yang andal							
	Tingkat downtime sistem TIK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Min / Ave
Realisasi	-	0%	0%	-	-	-	0%	
Capaian	N/A	120	120	N/A	N/A	N/A	120	

Penjelasan
Pada tahun 2019, aplikasi yang dipantau adalah e-registrasi pendaftaran SPMB PKN STAN yang diselenggarakan pada tanggal 9-30 April 2019. Berdasarkan pemantauan server pada aplikasi PRTG (Pasessler Router Traffic Grapher) downtime sistem tidak terjadi sepanjang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	1%	0,0270%	0,35%	0,0059%	0,35%	-
Triwulan II	1%	0,0699%	0,35%	0,0062%	0,35%	0%
Triwulan III	1%	0,0560%	0,35%	0,0102%	0,35%	-
Triwulan IV	1%	0,0827%	0,35%	0,0106%	0,35%	0%
Tahunan	1%	0,0827%	0,35%	0,0106%	0,35%	0%

12. Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

12a-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA15

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, unit eselon I terkait, dan Itjen.
- rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Tujuan IKU ini adalah Untuk mengetahui tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku.

Formula:
Semester I
$\text{Semester I} = (a/b) \times 100\%$
Semester II
$\text{Semester II} = \{(a+c)/(d+e)\} \times 100\%$
Keterangan: a = 1. Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai; dan 2. Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti. b = 1. Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK; dan 2. Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018. c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 yang diusulkan selesai sampai dengan Semester II tahun 2019 d = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 Tahun 2018 e = 1. Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2018; dan 2. Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti. Dalam hal LHP keluar setelah semester I, maka penghitungan komponen a1 dan b2 diperhitungkan pada saat LHP dikeluarkan oleh BPK.
Ket: Untuk a.2 : Jumlah konsep temuan LK BA15 tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti dibedakan menjadi: Nilai 0,5 apabila tindak lanjut sudah ditindaklanjuti namun belum dapat diselesaikan oleh unit eselon I terkait; Nilai 0,7 apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Unit Eselon I terkait namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh pihak eksternal dalam lingkup Kemenkeu terkait, sehingga belum dapat dikirim ke BPK; Nilai 0,9 apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh pihak eksternal Kemenkeu terkait karena adanya kendala di luar kendali pihak eksternal Kemenkeu tersebut, sehingga belum dapat dikirim ke BPK; Nilai 1 apabila konsep temuan telah selesai ditindaklanjuti (selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta dikirim ke BPK)
Untuk c: Jumlah rekomendasi BPK dalam LHPLK BA 15 yang diusulkan selesai dibedakan menjadi: Nilai 0,5 apabila tindak lanjut sudah ditindaklanjuti namun belum dapat diselesaikan oleh unit eselon I terkait; Nilai 0,7 apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Unit Eselon I terkait namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh pihak eksternal dalam lingkup Kemenkeu terkait, sehingga belum dapat dikirim ke BPK; Nilai 0,9 apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu namun belum dapat selesai

ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu terkait karena adanya kendala di luar kendali pihak eksternal Kemenkeu tersebut, sehingga belum dapat dikirim ke BPK;

Nilai 1 apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBA 015 adalah sebagai berikut:

BPPK	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ KP
Target	-	30%	30%	-	30%	90%	90%	Max/ TLKV
Realisasi	-	86,89%	86,89%	-	-	98,20%	98,20%	
Capaian	N/A	120	120	N/A	N/A	109,11	109,11	

Penjelasan

Pada tahun 2019, dari 61 rekomendasi LHP BPK yang masih harus ditindaklanjuti terhadap LK BPPK TA2009-2018,

55 diantaranya telah berstatus selesai sedangkan 6 sisanya berstatus dalam proses.

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \{(a+c)/(d+e)\} \times 100\% \\
 &= \{(55+4,9)/(1+60)\} \times 100\% \\
 &= 98,20\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

a = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHPLK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai; dan Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti.

c=Jumlah rekomendasi BPK dalam LHPLK BA 15 yang diusulkan selesai sampai dengan Semester II tahun 2019.

d=Jumlah rekomendasi BPK dalam LHPLK BA 15 Tahun 2018

e=Jumlah rekomendasi BPK dalam LHPLK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2018; dan Jumlah konsep temuan LKBA 15 Tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti.

TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS SELESAI	DALAM PROSES		UIC
			JML	POIN	
2009	3	2	1	0,9	BDK Manado

2010	0	0	0	-	-
2011	7	7	0	-	-
2012	10	10	0	-	-
2013	5	4	1	0,9	Pusdiklat KNPK
2014	12	12	0	-	-
2015	12	11	1	0,7	Pusdiklat Pajak, PKN STAN
2016	7	5	2	1,5	Pusdiklat Pajak
2017	2	2	0	-	-
2018	3	2	1	0,9	Pusdiklat PSDM
TOTAL	61	55	6	4,9	-

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	N/A	N/A	-	-	-	-
Triwulan II	N/A	N/A	30%	86,67%	30%	86,89%
Triwulan III	N/A	N/A	30%	86,15%	30%	-
Triwulan IV	N/A	N/A	89%	91,08 %	90%	98,20%
Tahunan	N/A	N/A	89%	91,08 %	90%	98,20%

12b-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan Surat Edaran nomor SE-2/MK.1/2019 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Aspek

kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada Surat Edaran nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan IKU ini adalah untuk Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Formula:									
Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada Surat Edaran nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun perhitungan realisasi IKU =									
$\text{Realisasi IKU Persentase KPA} = \frac{\sum \text{nilai akhir seluruh indikator}}{\sum \text{bobot indikator}} \times 100\%$									
Nilai akhir per indikator = % bobot indikator x realisasi indikator									
No	Indikator	Bobot	Periode Pelaporan	Cascade		Trajectory			
				Satker	Non-satker	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Capaian Keluaran	30%	Tahunan	✓	✓	-	-	-	✓
2	Efisiensi	15%	Tahunan	✓	✓	-	-	-	✓
3	Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto	15%	Triwulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Konsistensi	10%	Triwulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Revisi DIPA	5%	Triwulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penyelesaian Tagihan	4%	Triwulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pengelolaan UP	4%	Triwulanan	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	Data Kontrak	3%	Triwulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Kesalahan SPM	3%	Triwulanan	✓	-	✓	✓	✓	✓
10	Retur SP2D	3%	Triwulanan	✓	-	✓	✓	✓	✓
11	Renkas	2%	Triwulanan	✓	-	✓	✓	✓	✓
12	Penyampaian LPJ	2%	Triwulanan	✓	-	✓	✓	✓	✓
13	Pagu Minus	2%	Tahunan	✓	-	-	-	-	✓
14	Dispensasi SPM	2%	Tahunan	✓	-	-	-	-	✓

1. Capaian Keluaran Konsolidasi Lokasi untuk indikator Capaian Keluaran: Raw Data Konsolidasi

Periode untuk indikator Capaian Keluaran: Take Last Known

$$\text{CKP} = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\frac{\sum_{j=1}^n \text{Realisasi Indikator}_i}{\sum_{j=1}^n \text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\% \quad \text{CKK} = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{\text{RVK ke } i}{\text{TVK ke } i} \times \left(\frac{\sum_{j=1}^n \text{Realisasi Indikator}_i}{\sum_{j=1}^n \text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

2. Efisiensi Konsolidasi Lokasi untuk indikator Efisiensi: Raw Data Konsolidasi Periode untuk indikator Efisiensi: Take Last Known

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\% \quad NE = 90\% + E\%$$

3. Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto Konsolidasi Lokasi untuk indikator Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto : Raw Data Konsolidasi Periode untuk indikator Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto :Take Last Known

Pagu netto = Total pagu bruto – (pagu belanja pegawai + self blocking + hasil efisiensi IMK + pagu dana khusus)

Realisasi pagu netto = Total realisasi bruto – (realisasi belanja pegawai + realisasi dana khusus)

$$P = \frac{\text{realisasi pagu netto}}{\text{pagu netto}}$$

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto} = \frac{\text{Persentase penyerapan anggaran atas pagu netto per triwulan}}{\text{Target penyerapan anggaran atas pagu netto per triwulan}}$$

4. Konsistensi Konsolidasi Lokasi untuk indikator Konsistensi: Average Konsolidasi Periode untuk indikator Konsistensi: Average

$$\% \text{ konsistensi bulanan} = 1 - \left(\frac{|RPD - \text{Realisasi penyerapan}|}{RPD} \right) \times 100\%$$

$$\% \text{ konsistensi tahunan (K)} = \frac{\sum_{i=1}^n \% \text{ konsistensi bulanan}}{n}$$

+Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

BPPK	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Max / Ave
Realisasi	97,15%	97,22%	97,18%	97,45%	97,27%	106,11%	97,98%	
Capaian	102,26	102,34	102,29	102,58	102,39	105,38	103,13	

Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama

1. Konsistensi : Terdapat satuan kerja di lingkungan BPPK yang pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasanya mundur dari jadwal yang telah direncanakan dan terdapat pengembalian belanja

perjalanan dinas diklat yang baru teridentifikasi pada akhir periode triwulan IV sehingga tidak dapat diakomodasi pada revisi RPD triwulan IV satke. 2. Kesalahan SPM: Terdapat satuan kerja di lingkungan BPPK yang mengalami penolakan SPM oleh KPPN. 3. Retur SP2D: Terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan BPPK yang nilai retur SP2D-nya tidak Maksimal
Implikasi Beberapa nilai unsur IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran BPPK menjadi tidak optimal.

Akar Masalah
1. Dinamika organisasi dan kebutuhan stakeholders yang mengakibatkan perubahan waktu maupun nominal realisasi penarikan dana dari rencana yang sudah ditetapkan dan belum optimalnya proses pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan diklat. 2. Kurangnya ketelitian staf PPK, staf PPSPM, dan PPSPM dalam pengisian kode pembayaran SPM; 3. Kurangnya koordinasi antara pemilik kegiatan, PPK, staf PPK, dan penyedia/karyasiswa terkait data rekening yang diajukan sebagai tujuan pembayaran.
Tindakan yang Telah Dilaksanakan
1. Menyusun panduan/kertas kerja SE-2/MK.1/2019 untuk memudahkan satker dalam memahami dan menghitung IKU KPAdi lingkungan BPPK; 2. Melaksanakan forum <i>coaching dinic</i> pengelolaan keuangan BPPK guna memonitor pelaksanaan strategi pencapaian target; 3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil forum coaching dinic melalui groupchat Kinerja Anggaran (Kijang) BPPK.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Mengidentifikasi ulang kebutuhan stakeholders dan kebutuhan pembiayaannya; 2. Melakukan review rencana kegiatan, rencana umum pengadaan, dan rencana penarikan dana Q1 TA2020 serta melakukan revisi jika diperlukan 3. Mengadakan coaching dinic pengelolaan keuangan BPPK secara rutin	Semua Unit Semua Unit Sekretariat Badan	Triwulan I 2020

Perkembangan IKU dari tahun ke tahun Tabel Data:

Periode Pelaporan	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	N/A	N/A	10%	31,69%	95%	97,15%
Triwulan II	N/A	N/A	35%	49,87%	95%	97,22%
Triwulan III	N/A	N/A	65%	67,51%	95%	97,18%
Triwulan IV	N/A	N/A	95%	95,03 %	95%	106,11%
Tahunan	N/A	N/A	95%	95,03 %	95%	97,98%

Secara umum, tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran BPPK. Sedangkan target dan realisasi capaian keluaran (*output*) serta realisasi biaya kegiatan periode Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 3.4
Realisasi Output Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2019

Kode	ES1-Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
151104	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	635.293.838.000	608.639.762.386	95,8
	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara			
1731	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	159.286.544.000	151.004.054.192	94,8
1.737.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	357.457.000	111.886.110	31,3
1.737.502	Layanan Pembelajaran di Daerah (Kelas)	95.902.677.000	89.939.806.038	93,78
1.737.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	19.630.784.000	19.157.430.797	97,59
1.737.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	2.496.845.000	2.185.422.918	87,53
1.737.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	40.898.781.000	39.609.508.329	96,85
1732	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	27.921.526.000	26.351.932.677	94,38
1.732.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	124.961.000	93.037.500	74,45
1.732.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan (Kelas)	8.718.723.000	8.168.532.466	93,69
1.732.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	5.286.974.000	4.732.428.166	89,51
1.732.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	643.188.000	533.452.060	82,94
1.732.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	13.147.680.000	12.824.482.485	97,54
1733	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	27.397.893.000	25.164.966.472	91,85
1.733.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	447.380.000	148.587.870	33,21
1.733.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (Kelas)	12.038.487.000	10.910.607.195	90,63
1.733.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.559.200.000	2.559.143.660	100
1.733.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	582.544.000	471.002.580	80,85
1.733.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	11.770.282.000	11.075.625.167	94,1
1734	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	28.425.646.000	25.861.647.063	90,98
1.734.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	543.553.000	243.199.450	44,74
1.734.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Kelas)	7.436.987.000	6.316.392.687	84,93

1.734.503	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Peserta)	12.043.680.000	11.454.864.632	95,11
1.734.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	25.115.000	22.950.000	91,38
1.734.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	446.996.000	286.709.600	64,14
1.734.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	7.929.315.000	7.537.530.694	95,06
1735	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	27.050.063.000	26.534.074.287	98,09
1.735.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	293.350.000	189.812.627	64,71
1.735.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Keuangan Umum (Kelas)	9.303.538.000	9.212.534.588	99,02
1.735.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	8.120.000.000	7.976.230.427	98,23
1.735.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	309.741.000	292.598.440	94,47
1.735.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	9.023.434.000	8.862.898.205	98,22
1736	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	35.743.823.000	34.893.305.820	97,62
1.736.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	392.680.000	274.250.400	69,84
1.736.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Perpajakan (Kelas)	15.242.182.000	14.829.568.970	97,29
1.736.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1.241.568.000	1.220.937.977	98,34
1.736.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	919.719.000	798.893.895	86,86
1.736.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	17.947.674.000	17.769.654.578	99,01
1737	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan	125.037.747.000	120.168.800.587	96,11
1.737.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	498.788.000	260.609.100	52,25
1.737.502	Layanan Pembelajaran Kepemimpinan dan Manajemen (kelas)	50.067.250.000	46.611.693.801	93,1
1.737.503	Layanan Beasiswa Pascasarjana (orang)	57.785.338.000	56.953.208.673	98,56
1.737.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1.582.000.000	1.577.608.588	99,72
1.737.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	670.958.000	596.359.268	88,88
1.737.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	14.433.413.000	14.169.321.157	98,17
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	147.058.823.000	143.082.479.467	97,3
1.738.502	Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan (Kelas)	63.362.386.000	62.874.667.289	99,23
1.738.503	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama - BLU (Layanan)	15.922.900.000	15.819.916.120	99,35
1.738.504	Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Layanan)	5.301.116.000	4.128.164.107	77,87
1.738.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	22.142.051.000	20.717.194.865	93,56
1.738.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	2.554.330.000	2.537.784.913	99,35
1.738.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	37.776.040.000	37.004.752.173	97,96
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	57.371.773.000	55.578.501.821	96,87
1.739.503	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	86.628.000	86.075.000	99,36
1.739.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	20.548.464.000	19.041.593.943	92,67
1.739.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	12.264.971.000	12.166.692.925	99,2
1.739.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	24.471.710.000	24.284.139.953	99,23

Sumber: Bagian Keuangan, Sekretariat Badan

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran BPPK Triwulan IV TA 2019

Secara umum realisasi anggaran BPPK sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan baik di Pusdiklat maupun di balai, begitu juga dengan pelatihan dana desa yang dilaksanakan oleh Pusdiklat KNPK.
- b. PKN STAN telah melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- c. Kegiatan executive training dan penyelenggaraan beasiswa juga telah dilaksanakan oleh Pusdiklat PSDM.
- d. Beberapa kegiatan belanja modal sudah selesai dilaksanakan, diantaranya yang cukup signifikan adalah : lanjutan pembangunan gedung BDK Pekanbaru, Pengadaan Alat Laboratorium Pajak, Bea Cukai, Komputer dan lainnya, serta Pengadaan Meubelair untuk laboratorium tersebut pada PKN STAN, pekerjaan turap pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, dan pekerjaan konstruksi pada Pusdiklat Keuangan Umum.

Realisasi anggaran BPPK sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp608.639.762.386 atau 95,80 persen dari anggaran Rp635.293.838.000. Realisasi anggaran terbesar diantaranya berasal dari output sebagai berikut.

- a. Layanan Pembelajaran yang dimiliki oleh seluruh satker di lingkungan BPPK yang merupakan tusi BPPK di bidang pelatihan sebesar Rp185.989.135.745, pelatihanpelatihan tersebut diantaranya : pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Keuangan Umum, dan pelatihan yang diselenggarakan di balai diklat di lingkup BPPK.
- b. Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan yang dimiliki PKN STAN terkait kegiatan perkuliahan dan penerimaan mahasiswa sebesar Rp62.874.667.289.
- c. Layanan Beasiswa Pascasarjana yang dimiliki Pusdiklat PSDM yang digunakan untuk program karyasiswa pegawai lingkup Kementerian Keuangan sebesar Rp56.953.208.673.
- d. Selain itu, terdapat layanan Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang dilaksanakan oleh Pusdiklat KNPK dengan realisasi sebesar Rp11.454.864.632.
- e. Beberapa output lainnya yang menunjang TUSI BPPK antara lain : Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran, serta Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan yang diselenggarakan oleh seluruh satker.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- e. adanya efisiensi yang berasal dari akomodasi kediklatan terkait dengan penerapan konversi 30% pelatihan klasikal menjadi e-learning yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi anggaran di belanja barang terkait pelatihan;
- f. adanya efisiensi yang berasal dari belanja birokrasi, diantaranya : belanja ATK diklat, konsumsi diklat, dan perjalanan dinas yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi anggaran di belanja barang terkait pelatihan;
- g. ketidakpastian jadwal pelaksanaan Executive Training baik dari pimpinan maupun peserta pelatihan sehingga realisasi anggaran perjalanan dinas luar negeri kurang optimal;
- h. adanya kendala dalam penentuan rencana pembiayaan beasiswa untuk karyasiswa karena ketidakpastian tempat tujuan kuliah dan waktu keberangkatan karyasiswa;
- i. adanya perubahan kurikulum diklat pimpinan dimana waktu pelaksanaan diklat lebih cepat 2 minggu dari kurikulum sebelumnya atau yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga terdapat sisa dari hasil akomodasi kediklatan dan perjalanan dinas peserta diklat;
- j. adanya pekerjaan pengadaan belanja modal yang mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena adanya beberapa kendala, namun sampai dengan akhir tahun 2019 pekerjaan pengadaan telah selesai dilaksanakan, diantaranya :
 - 1) kendala pada proses lelang pengadaan sehingga dilakukan lelang ulang dan berakibat pada mundurnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari jadwal yang telah ditentukan (BDK Pekanbaru dan Pusdiklat Pajak);
 - 2) kendala pada proses lelang pengadaan yang disebabkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di salah satu daerah tidak aktif sehingga pengadaan mundur dari jadwal yang telah ditentukan (BDK Palembang);
 - 3) mundurnya jadwal lelang konsultan perencanaan pembangunan gedung dan bangunan di PKN STAN;
 - 4) pengadaan hydrant BDK Pontianak dan BDK Balikpapan mundur dari jadwal karena adanya penyesuaian HPS;
 - 5) lanjutan pembangunan gedung asrama diklat Pusdiklat Keuangan Umum yang mundur dari jadwal karena sebelumnya masih dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak (KemenPUPR, Itjen, Pemprov DKI Jakarta, serta konsultan perencanaan awal) terkait kesiapan untuk melanjutkan pembangunan gedung asrama yang telah terhenti di tahun 2011.
- k. adanya efisiensi dari hasil lelang;

2. Penjelasan atas Realisasi Anggaran Yang Tidak Mencapai Target

Terdapat beberapa output yang realisasi anggarannya kurang optimal, diantaranya :

- Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan yang ada di masing-masing satuan kerja, secara keseluruhan realisasi anggaran output tersebut adalah Rp1.407.458.057 atau 51,28 persen. Hal ini disebabkan dalam proses pencapaian output tersebut beberapa anggaran dapat dilakukan efisiensi karena dikerjakan secara mandiri oleh satuan kerja;
- Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ada di PKN STAN dengan realisasi anggaran output sebesar Rp4.128.164.107 atau 77,87 persen. Hal ini disebabkan beberapa anggaran dapat dilakukan efisiensi;
- Layanan Pembelajaran yang ada diseluruh satuan kerja dengan realisasi anggaran output sebesar Rp185.989.135.745 atau 93,60 persen. Hal ini disebabkan adanya penerapan konversi 30% pelatihan klasikal menjadi e-learning sehingga terdapat efisiensi dari akomodasi kediklatan berupa belanja ATK diklat, konsumsi, diklat, dan perjalanan dinas;
- Selain itu, terdapat efisiensi dari hasil lelang pengadaan.

3. Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Triwulan IV TA 2019 Tabel terlampir pada lampiran II.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	635.293.838.000	608.639.762.386	95,80
1731	PengembanganSDMMelalui Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Negara Di Daerah	159.286.544.000	151.004.054.192	94,80
1732	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan	27.921.526.000	26.351.932.677	94,38
1733	PengembanganSDMMelalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Kepabeanaan Dan Cukai	27.397.893.000	25.164.966.472	91,85
1734	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan	28.425.646.000	25.861.647.063	90,98

1735	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan	27.050.063.000	26.534.074.287	98,09
1736	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Perpajakan	35.743.823.000	34.893.305.820	97,62
1737	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan	125.037.747.000	120.168.800.587	96,11
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	147.058.823.000	143.082.479.467	97,30
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja Di Lingkungan Bppk	57.371.773.000	55.578.501.821	96,87

D. Realisasi Output Kegiatan

Realisasi Output BPPK Triwulan IV TA 2019

Realisasi Output BPPK sampai dengan Triwulan IV TA 2019 terbesar berasal dari Output Pembelajaran yang merupakan kegiatan kediklatan-kediklatan yang dilakukan seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK yang mencapai 145,31 persen, Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK yang mencapai 101,29 persen, output Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan yang mencapai 117,22 persen, dan output Layanan Beasiswa Pascasarjana dengan capaian 119,42 persen. Selain itu terdapat output Layanan Dukungan Manajemen, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, serta output layanan perkantoran yang merupakan kegiatan rutin perkantoran yang ada di seluruh satuan kerja.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi

- Adanya perubahan kalender diklat, diantaranya disebabkan adanya perubahan kebutuhan stakeholder pelatihan.
- Adanya perubahan Rencana Umum Pengadaan.
- Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan non kediklatan.

Penjelasan atas Capaian Output Yang Tidak Mencapai Target Realisasi output telah tercapai.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2019

Kode	ES1-Program/Kegiatan/Output	Anggaran			Output On Progress	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%	
151104	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	635.293.838.000	608.639.762.386	95,8		
	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara					
1731	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	159.286.544.000	151.004.054.192	94,8		
1.737.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	357.457.000	111.886.110	31,3	130,7	100
1.737.502	Layanan Pembelajaran di Daerah (Kelas)	95.902.677.000	89.939.806.038	93,78	105,29	100
1.737.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	19.630.784.000	19.157.430.797	97,59	100	100
1.737.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	2.496.845.000	2.185.422.918	87,53	100	100
1.737.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	40.898.781.000	39.609.508.329	96,85	100	100
1732	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	27.921.526.000	26.351.932.677	94,38		
1.732.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	124.961.000	93.037.500	74,45	110	100
1.732.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan (Kelas)	8.718.723.000	8.168.532.466	93,69	166,67	100
1.732.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	5.286.974.000	4.732.428.166	89,51	100	100
1.732.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	643.188.000	533.452.060	82,94	100	100
1.732.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	13.147.680.000	12.824.482.485	97,54	100	100
1733	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	27.397.893.000	25.164.966.472	91,85		
1.733.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	447.380.000	148.587.870	33,21	160	100
1.733.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (Kelas)	12.038.487.000	10.910.607.195	90,63	130,3	100
1.733.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.559.200.000	2.559.143.660	100	100	100
1.733.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	582.544.000	471.002.580	80,85	100	100
1.733.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	11.770.282.000	11.075.625.167	94,1	100	100
1734	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	28.425.646.000	25.861.647.063	90,98		
1.734.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	543.553.000	243.199.450	44,74	242,86	100
1.734.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Kelas)	7.436.987.000	6.316.392.687	84,93	195,83	100
1.734.503	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Peserta)	12.043.680.000	11.454.864.632	95,11	101,29	100
1.734.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	25.115.000	22.950.000	91,38	100	100
1.734.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	446.996.000	286.709.600	64,14	100	100
1.734.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	7.929.315.000	7.537.530.694	95,06	100	100
1735	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	27.050.063.000	26.534.074.287	98,09		

1.735.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	293.350.000	189.812.627	64,71	205,56	100
1.735.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Keuangan Umum (Kelas)	9.303.538.000	9.212.534.588	99,02	103,57	100
1.735.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	8.120.000.000	7.976.230.427	98,23	100	100
1.735.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	309.741.000	292.598.440	94,47	100	100
1.735.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	9.023.434.000	8.862.898.205	98,22	100	100
1736	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	35.743.823.000	34.893.305.820	97,62		
1.736.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	392.680.000	274.250.400	69,84	323,53	100
1.736.502	Layanan Pembelajaran di Bidang Perpajakan (Kelas)	15.242.182.000	14.829.568.970	97,29	389,58	100
1.736.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1.241.568.000	1.220.937.977	98,34	100	100
1.736.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	919.719.000	798.893.895	86,86	100	100
1.736.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	17.947.674.000	17.769.654.578	99,01	100	100
1737	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan	125.037.747.000	120.168.800.587	96,11		
1.737.501	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	498.788.000	260.609.100	52,25	121,88	100
1.737.502	Layanan Pembelajaran Kepemimpinan dan Manajemen (kelas)	50.067.250.000	46.611.693.801	93,1	493,36	100
1.737.503	Layanan Beasiswa Pascasarjana (orang)	57.785.338.000	56.953.208.673	98,56	119,42	100
1.737.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1.582.000.000	1.577.608.588	99,72	100	100
1.737.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	670.958.000	596.359.268	88,88	100	100
1.737.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	14.433.413.000	14.169.321.157	98,17	100	100
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	147.058.823.000	143.082.479.467	97,3		
1.738.502	Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan (Kelas)	63.362.386.000	62.874.667.289	99,23	117,22	100
1.738.503	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama - BLU (Layanan)	15.922.900.000	15.819.916.120	99,35	100	100
1.738.504	Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Layanan)	5.301.116.000	4.128.164.107	77,87	100	100
1.738.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	22.142.051.000	20.717.194.865	93,56	100	100
1.738.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	2.554.330.000	2.537.784.913	99,35	100	100
1.738.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	37.776.040.000	37.004.752.173	97,96	100	100
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	57.371.773.000	55.578.501.821	96,87		
1.739.503	Layanan Penelitian dan Manajemen Pengetahuan (Layanan)	86.628.000	86.075.000	99,36	100	100
1.739.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	20.548.464.000	19.041.593.943	92,67	100	100
1.739.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	12.264.971.000	12.166.692.925	99,2	100	100
1.739.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	24.471.710.000	24.284.139.953	99,23	100	100

Pembiayaan atas Capaian Kinerja Tabel rincian pembiayaan dapat dilihat pada lampiran IV.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Pembiayaan (Rp)	Sumber
1	SDM yang Kompetitif	1a-CP	Nilai Peningkatan Kompetensi SDM	161.395.854.327	Output : Layanan Dukungan Manajemen, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Kecuali Suboutput Layanan Organisasi dan Tata Laksana serta komponen Pelayanan TIK), Penelitian dan Manajemen Pengetahuan, Pendidikan Program Diploma Keuangan, Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama BLU, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Beasiswa Pascasarjana
2	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan Kebutuhan	2a-N	Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat minimal Baik	70.130.617.405	Output: Layanan Sarana Prasarana Internal
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	
4	Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi	4a-N	Persentase Implementasi Inisiatif RTBK	-	
5	Program yang Akomodatif	5a-N	Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A	-	Output : Pembelajaran (Pusdiklat dan Balai) Suboutput : Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran (bersama dengan IKU 7a-N
		5b-N	Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu	184.282.331.694	Output : Pembelajaran (Pusdiklat dan Balai) kecuali Suboutput Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran dan Komponen Sertifikasi Kompetensi pada Suboutput Layanan Penjaminan Mutu
6	Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif	6a-N	Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran	-	
7	Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif	7a-N	Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi	1.589.869.551	Output : Pembelajaran (Pusdiklat dan Balai) Suboutput : Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran
8	SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat	8a-CP	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	
9	Organisasi yang Kondusif	9a-CP	Indeks Tata Kelola Organisasi	4.791.094.649	Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Suboutput : Layanan Organisasi dan Tata Laksana
		9b-N	Persentase Implementasi Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara	116.934.500	Output : Pembelajaran (Pusdiklat) Suboutput : Penjaminan Mutu Komponen : Sertifikasi Kompetensi
10	Sistem Manajemen Informasi yang Andal	10a-CP	Tingkat Downtime Sistem TIK	3.594.131.288	Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Suboutput : Pengelolaan Layanan Umum
		10b-CP	Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I		
11	Pengelolaan Anggaran yang Optimal	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	173.137.912.741	Output : Layanan Perkantoran

E. Kinerja Lainnya

1. Peran serta aktif BPPK

A. Penghargaan Yang Diterima BPPK

1) Anugerah *Best Corporate University Holistic Human and Digital Approach Bronze Award* di *Global Council of Corporate University, Sao Paulo, Brazil*.

Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kemenkeu CorpU) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih *Holistic Human and Digital Bronze Award 2019* yang diadakan *Global Council of Corporate University (Global CCU)* di Sao Paulo, Brazil, 8 Mei 2019.

Penghargaan Global CCU ini diberikan kepada para praktisi terbaik *Corporate University* dari berbagai penjuru dunia. Kementerian Keuangan bersaing dengan belasan negara lain di antaranya India, Prancis, Brazil, Jerman, Rusia, Saudi Arabia, dan Swiss. Kemenkeu bersama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menjadi perwakilan Indonesia yang berhasil lolos sebagai finalis di Global CCU Award. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap praktisi *Corporate University* yang menghasilkan nilai strategis untuk masyarakat dan bisnisnya.



Penghargaan *Holistic Human and Digital Bronze Award 2019* yang diadakan *Global Council of Corporate University (Global CCU)* yang bertempat di Sao Paulo, Brazil, 8 Mei 2019.



Penghargaan *Holistic Human and Digital Bronze Award 2019* yang diterima Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Heni Kartikawati yang bertempat di Sao Paulo, Brazil, 8 Mei 2019.

2) Majalah Edukasi Keuangan Raih Silver Winner pada Ajang InMA 2019

Majalah internal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Edukasi Keuangan, berhasil meraih penghargaan sebagai *Silver Winner* pada ajang *The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2019* dalam kategori Kementerian. Penyerahan trofi kemenangan

tersebut berlangsung di Gedung Siola Surabaya pada acara Malam Penghargaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia, pada tanggal 7 Februari 2019.

SPS Indonesia merupakan wadah berkumpulnya para penerbit pers cetak dan non-cetak/digital di Indonesia. Didirikan di Yogyakarta pada 8 Juni 1946, organisasi ini rutin mengadakan ajang penghargaan *Indonesia Print Media Awards* (IPMA), *Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA), *Indonesia Student Print Media Awards* (ISPRIMA), dan *Indonesia Young Readers Awards* (IYRA) setiap tahunnya. Apresiasi ini merupakan wujud dedikasi SPS untuk memicu lahirnya karya-karya sampul muka media cetak dan digital (*e-magazine*). Ada dua kategori berupa media cetak dan digital yang dilombakan pada ajang ini yang terbagi ke dalam tujuh sub kategori yaitu:

1. Kementerian
2. Lembaga Pemerintah Pusat
3. BUMN
4. BUMD
5. Perusahaan Swasta Nasional
6. Perusahaan Multinasional
7. Perguruan Tinggi



penghargaan sebagai *Silver Winner* pada ajang *The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2019 dalam kategori Kementerian, di Gedung Siola Surabaya pada acara Malam Penghargaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia, tanggal 7 Februari 2019.

3) BPPK Terpilih Sebagai Salah Satu Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik 2019,

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mewakili Kementerian Keuangan berhasil menyabet beberapa penghargaan sekaligus dalam Kompetisi Lembaga Pelatihan Pemerintah (LPP) Terbaik 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kompetisi ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan. BPPK dinobatkan sebagai LPP Terbaik 2019: Learning Centre for the Fourth Industrial Revolution kategori Lembaga Pemerintah Pusat Terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS Terbaik ke-III melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Keuangan. Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Pusdiklat PSDM, Anies Said Basalamah.



Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Pusdiklat PSDM, Anies Said Basalamah.



BPPK juga meraih penghargaan Peringkat I Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 melalui Junaedi Purnomo, Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.



Selain itu, dalam kategori Kompetisi Inovasi Pelatihan Kepemimpinan III, BPPK juga meraih peringkat III terbaik melalui Agung Yuniarto, Pejabat Adminstrator pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

4) Bdk Medan Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi Di Level Kementerian Keuangan



Balai Diklat Keuangan Medan menerima penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi Di Level Kementerian Keuangan yang diterima kepala BDK Medan Harmonis Siregar.

Event dan Peran Serta

1. Kunjungan BPKP

Implementasi *e-learning* dan *Corporate University (Corpu)* di Kementerian Keuangan, khususnya BPPK rupanya menarik sejumlah pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi tersebut. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali menerima kunjungan dari Kementerian/Lembaga pada tanggal 12 Februari 2019. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklat BPKP) ke Sekretariat BPPK untuk *benchmarking* implementasi aplikasi evaluasi pembelajaran *online*. BPPK menyampaikan materi terkait *knowledge management* di BPPK, mulai dari *Kemenkeu Learning Center (KLC)* dan fitur-fitur di dalamnya, Semantik, hingga bentuk-bentuk *knowledge capture* dan *course* yang ada di BPPK. BPKP yang diwakili Bidang Evaluasi

[illegible]

A group of people are seated around a dark wooden table in a meeting room. The room features a decorative wall with a white floral pattern on a dark background. Several people are visible, including a man in a light blue shirt on the left, a man in a pink shirt in the center, and a man in a patterned shirt on the right. They appear to be engaged in a discussion. The chairs have a light-colored upholstered backrest. A small table with a water bottle and some papers is visible on the right side of the table.

78 | Page

2. Kunjungan BPSDM Jabar

Dalam beberapa tahun terakhir, instansi pemerintah semakin banyak yang melirik strategi *corporate university* (*Corpu*) dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusianya. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah instansi/lembaga pemerintah yang berkunjung ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk kaji banding terkait implementasi *corpu*. Pada tanggal 14 Februari 2019, bertempat di Sekretariat BPPK, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat (BPSDM Pemprov Jabar) melakukan *benchmark* penyusunan kurikulum berbasis *corporate university*. BPSDM Pemprov Jabar yang baru akan menerapkan strategi *corpu* ini, berniat untuk berdiskusi terkait desain pembelajaran yang ada di BPPK.

Sebagai pembuka, sekira 30 peserta kunjungan yang terdiri dari widyaiswara dan pejabat eselon IV tersebut disuguhkan video kaleidoskop pencapaian BPPK 2018, serta penjelasan singkat mengenai *knowledge repository* BPPK, Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Peserta kunjungan dengan seksama menyimak sejumlah video pembelajaran yang ditampilkan dalam KLC. Usai pemutaran video, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) BPPK, Wisnu Hariadi menjelaskan secara umum implementasi strategi *corpu* di BPPK. Kemudian pemaparan dilanjutkan dengan teknis penyusunan kurikulum yang ada di BPPK, diwakili oleh Pusdiklat Keuangan Umum dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK). Perwakilan narasumber dari pusdiklat menjelaskan tentang bagan besar desain pembelajaran yang ada di BPPK, setelah diterapkannya strategi *corpu* pada 2015 silam. Banyak peserta kunjungan yang antusias bertanya terkait penerapan desain pembelajaran tersebut, khususnya pada metode pembelajaran 10, 20, dan 70 yakni 10 persen *education* (pendidikan formal), 20 persen *social learning*, dan 70 persen *experiential learning*. Meski uniknya strategi *corpu* adalah tidak seluruhnya bisa sama diterapkan, namun pihak BPSDM berniat untuk mengadaptasi hal tersebut.

3. Learning Council Meeting

Pada hari Senin, 25 Februari 2019. Guna terus mendukung fungsinya sebagai *corporate university*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan *Learning Council Meeting* (LCM) yang dipimpin Menteri Keuangan serta dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pertemuan rutin tahunan ini dihelat sebagai bentuk penyampaian program strategis yang perlu didukung program pembelajaran.

Rapat yang menghadirkan para pimpinan Kementerian Keuangan ini membahas sejumlah program strategis dan prioritas di tahun 2020 yang puncaknya adalah arahan Menteri Keuangan terkait arah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Sekretaris Jenderal, Hadiyanto yang berkesempatan membuka diskusi hari ini, arah pengembangan pegawai yang dapat dilakukan yakni dengan adanya integrasi dan sinergi.



Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perlunya pengembangan SDM yang memahami Kemenkeu secara fundamental dan memperluas pemahaman hingga ke kondisi sosiokultural.



Saya selalu katakan, pelihara kegelisahan yang cukup. Sehingga kita punya api untuk selalu maju,? pungkasnya.

4. Peresmian Gedung Balai Diklat Kepemimpinan Kental Prosesi Adat Jawa

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Rionald Silaban meresmikan Gedung B Balai Diklat Kepemimpinan (BDPim), Magelang, Selasa (19/3/2019) pagi. Gedung tersebut baru saja rampung direnovasi dan menjadi wajah baru BDPim di tengah unsur-unsur tradisional Jawa yang masih dipertahankan sebagai salah satu ciri khas kantor vertikal BPPK ini.



Kepala BPPK (beskap merah, tengah) beserta jajaran pejabat BPPK usai meresmikan Gedung B Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

Mengawali peresmian tersebut, Kepala BPPK dan sejumlah pejabat eselon di BPPK melakukan kirab (arak-arakan) sebagai lambang persatuan antara pimpinan dengan jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Rionald menyampaikan adanya perubahan di segala bidang adalah suatu keniscayaan mengingat BPPK telah berkomitmen untuk terus mengikuti dinamika *sosiokultural*.



Kepala BPPK, Rionald Silaban memotong tumpeng simbol diresmikannya gedung

5. Kunjungan BPSDM DKI Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali kedatangan peserta kaji banding dari lembaga pemerintahan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (BPSDM Pemprov DKI Jakarta) mengunjungi BPPK untuk melakukan studi banding pengelolaan *corporate university* (corpu). BPSDM mengaku sedang mencari mekanisme yang paling cocok untuk diterapkan pada instansi mereka, dan strategi corpu adalah salah satu pertimbangannya.



Sejumlah perwakilan BPSDM Provinsi Jawa Barat (kiri) mendengarkan pemaparan tentang corporate university dari Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Heni Kartikawati (kanan)

Selain penjelasan terkait perjalanan corpu di BPPK, BPSDM juga disuguhkan materi terkait penyusunan desain pembelajaran yang disampaikan Kepala Subbidang Kurikulum, Nova Mardianti, *knowledge management* yang disampaikan Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sugeng Satoto, serta kebijakan corpu yang disampaikan Kepala Subbagian Organisasi, Sunardi. Selama penjelasan, pihak BPSDM sudah tidak sabar untuk berdiskusi dan banyak bertanya terkait implementasi corpu di BPPK. Mulai dari teknis pembuatan konten video di Kemenkeu *Learning Center* (KLC), penyusunan kurikulum dan bahan ajar, hingga penyusunan kebijakan terkait corpu. Heni menegaskan, jika corpu ini bukanlah nama lain atau *brand* dari BPPK, melainkan strategi yang dibangun untuk memperbarui sistem pembelajaran di BPPK. "Kemenkeu Corpu tidak bicara tempat, itu adalah strategi. Dari *training* menjadi *learning*," ungkapnya. Perwakilan BPSDM Pemprov DKI yang terdiri dari widyaiswara, kepala bidang, dan TGUPP tersebut mengaku banyak sekali yang harus dipelajari dan dikejar untuk membentuk corpu tersebut. Untuk itulah mereka merasa masih perlu banyak bertanya meski tak terasa sudah berada di pengujung waktu kunjungan.



Para peserta kunjungan dan narasumber dari BPPK berfoto bersama di depan logo Kemenkeu Corpu

4. Kunjungan Kementerian PPPA

Di era digital saat ini, perubahan budaya terjadi begitu cepat dan masif, serta konvergensi media terjadi di berbagai bidang. Hal ini pula yang sedang dialami sejumlah instansi pemerintahan, yang membuat para abdi negara dituntut untuk mengubah cara pandang dan budaya kerja. Pada Hari Jumat, 8 Maret 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan kunjungan dalam rangka kaji banding ke Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jumat (8/3/2019). Melalui kunjungan tersebut, pihak KPPPA berharap mengetahui sistem pengelolaan pengetahuan (*knowledge management system/KMS*) di BPPK.



Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sugeng Satoto menjawab pertanyaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)



Pihak BPPK yang diwakili Sugeng Satoto, Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Pilar Wirotama, dan Kepala Subbagian Organisasi, Sunardi ini pun saling bertukar salam dan mengakhiri kunjungan dengan berfoto bersama.

5 Kunjungan LIPI

Memasuki era disrupsi teknologi, banyak perubahan terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya digitalisasi di berbagai lini kehidupan. Tak terkecuali dalam hal pembelajaran, banyak metode mutakhir yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya dilakukan dengan pembelajaran dalam jaringan (online), yang kini telah merambah instansi pemerintahan. Menyadari kebutuhan tersebut, Pada tanggal 11 Maret 2019, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat LIPI) melakukan kunjungan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk mengetahui lebih lanjut terkait pengembangan sistem pembelajaran online.



Peserta kunjungan dari Pusbindiklat LIPI (lima kanan) berfoto bersama sejumlah narasumber kunjungan (empat kiri) di Sekretariat BPPK

Pusdiklat PSDM, menyampaikan proses penyusunan e-learning latsar CPNS Kemenkeu, yang diisi sejumlah materi berupa modul, video, hingga kuis yang seluruhnya harus diselesaikan

peserta latsar lima hari sebelum latsar tatap muka (*on campus*). Selain penjelasan terkait latsar, peserta kunjungan juga disuguhkan materi proses penyusunan *microlearning* di BPPK. Peserta kunjungan yang terdiri dari sejumlah widyaiswara dan tim teknis tersebut menyaksikan dengan seksama dan mencatat setiap detail yang dibutuhkan.



Peserta kunjungan dari LIPI yang terdiri dari widyaiswara dan tim teknis berdiskusi terkait *e-learning* latsar dengan narasumber dari BPPK.

6. Kunjungan SSDM Polri

Sejumlah instansi pemerintahan nampaknya ingin segera mengejar perkembangan zaman yang begitu dinamis dan berubah dengan sangat cepat. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan institusi terdasar sebagai pembangun sumber daya manusia di dalam organisasi. Salah satunya dilakukan dengan pengembangan metode pembelajaran berbasis jaringan, atau *e-learning*. Pada tanggal 13 Maret 2019, Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia (SSDM Polri), berkunjung ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk studi banding terkait penyusunan *e-learning*, khususnya *microlearning*.



Suasana kunjungan SSDM Polri di Sekretariat BPPK, Rabu (13/3/2019)



Heni Kartikawati menerima tanda mata yang diserahkan Kombes Pol Mardiyono usai melakukan kunjungan

Pusdiklat Keuangan Umum sebagai penyelenggara *microlearning* yang beberapa waktu lalu baru saja dilaksanakan untuk lebih dari 1200 pegawai BPPK, berkesempatan menyambut dan memberikan materi kepada pihak SSDM Polri. Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Heni Kartikawati, hadir langsung untuk membuka *benchmarking* dan menjelaskan secara singkat profil dan struktur organisasi di BPPK, bagaimana proses penyusunan *microlearning*, mulai dari platform yang digunakan, penyusunan analisis kebutuhan pembelajaran (AKP), pembuatan *storyboard*, hingga pengunggahan materi.



Peserta kunjungan berfoto bersama di depan logo Kemenkeu Corpu di pelataran perpustakaan Sekretariat Badan, BPPK.

2. Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kemensos

Munculnya tuntutan untuk mengembangkan metode pembelajaran ke arah digital, sejumlah instansi pemerintah berlomba-lomba untuk mulai membangun pelatihan dalam jaringan (*e-learning*). Setelah beberapa waktu lalu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan kaji banding (*benchmarking*) ke BPPK terkait penyusunan *e-learning* pelatihan dasar (latsar), Pada Tanggal 22 Maret 2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial RI datang berkunjung.



Peserta kunjungan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial diwakili Kabid Penyelenggaraan Diklat Aparatur, Eka Patriana, mengutarakan maksud kunjungan

"Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menerapkan *blended learning*, sebagian *e-learning* sebagian tatap muka, pada agenda nilai-nilai dasar PNS pada pembelajaran latsar Sedangkan *full e-learning* pada materi PKTBT (penguatan kompetensi teknis bidang tugas). Untuk materi yang mengandung aspek kognitif dapat menggunakan metode *e-learning*, sementara untuk menanamkan nilai-nilai (aspek kognitif), dilakukan pembelajaran di kelas. Pihak Pusdiklat Kesejahteraan Sosial pun ingin mengetahui jenis pembelajaran latsar apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam *e-learning*."



BPPK diwakili Pusdiklat PSDM berfoto bersama peserta kunjungan dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial

8. Kunjungan Pusdiklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Pada tanggal 9 April 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali menerima kunjungan *benchmarking* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diwakili oleh Pusdiklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Adapun *benchmarking* kali ini berfokus kepada pengelolaan *knowledge management* LKPP dalam rangka pembentukan "SMART" Pusdiklat PBJ atau yang dapat juga dikatakan sebagai 'KLC'-nya LKPP.



Demonstrasi webinar yang disaksikan oleh para peserta.

Selain diisi dengan berbagai diskusi dan tanya jawab, sesi *benchmarking* tersebut juga dimanfaatkan oleh para peserta *benchmarking* Pusdiklat PBJ yang berjumlah 9 orang ini untuk mengamati secara langsung Studio *E-Learning* BPPK. Rasa antusias tampak dari wajah para peserta saat mereka menyaksikan sejumlah peralatan yang terdapat di dalam studio dan mendengarkan penjelasan mengenai Studio *E-Learning* BPPK dengan seksama.



Para peserta benchmarking mengunjungi Studio E-Learning BPPK

10. Kunjungan BPSDM Kemenkumham

Strategi Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kemenkeu *Corpu*) mulai banyak dilirik akhir-akhir ini oleh beberapa instansi pemerintah yang membuka kemungkinan untuk dapat menerapkan hal serupa pada unit instansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pada tanggal 30 April 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali menerima kunjungan *benchmarking* yang kali ini berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Kemenkumham).



Sesi diskusi oleh peserta benchmarking BPSDM Kemenkumham



Sesi foto bersama peserta benchmarking BPSDM Kemenkumham

11. Kembali Kunjungi BPPK, LAN Ingin Perdalam Materi Corpu

Sebanyak 40 orang peserta Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkunjung ke Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Tiga puluh lima orang diantaranya merupakan peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang menduduki Jabatan Tinggi Madya (Jabatan Struktural Eselon I) dari instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Kehadiran mereka mendapat sambutan langsung dari Kepala BPPK, Rionald Silaban.



Sekretaris BPPK, Kusmanadji menyerahkan plakat kepada perwakilan LAN.



Sesi foto bersama peserta Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkunjung ke Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

12. Perdalam Corporate University, BPSDM Kemendagri Kunjungi BPPK sebagai Penggerak Utama Kemenkeu Corpu

Rabu, 21 Agustus 2019 Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan *benchmarking* ke Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Rabu (21/8). Kegiatan *benchmarking* BPSDM difokuskan pada strategi penerapan, pelaksanaan dan inovasi *Corporate University* di Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga menjadi tolak ukur BPSDM untuk mempersiapkan *Corporate University* di instansinya.



Sesi foto bersama peserta kegiatan *benchmarking* Kementerian Dalam Negeri ke Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

11. Pusdiklat AP Raih Predikat Lembaga Pelatihan PBJ Pemerintah Kinerja Terbaik 2019

Kamis, 22 Agustus 2019 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Pemerintah Kinerja Terbaik Tahun 2019 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penyerahan penghargaan tersebut bertempat di Aston Hotel Batam pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam acara Rapat Koordinasi LPPBJ dan Fasilitator PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP.



Penyerahan penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

12. Demi Wujudkan Gagasan Perubahan, Kemenkumham Lakukan Studi Tiru ke BPPK

Selasa, 27 Agustus 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan studi tiru ke Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Senin, 26/8). Dalam rangka rencana membentuk *Learning Development Center* pada Kantor Imigrasi tersebut, mereka berfokus terkait bagaimana penyusunan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan di BPPK serta pengelolaan sarana dan prasarana pelatihannya.



oto bersama perwakilan BPPK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

13. Orasi Ilmiah di LAN, Panggung Pengukuhan 4 Widyaiswara BPPK

Hari Rabu, 4 September 2019 Sebanyak empat widyaiswara dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menjalani orasi ilmiah di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selama dua hari, Selasa (3/9) hingga Rabu (4/9). Mereka adalah Bjardianto Pudjiono, Rudy Widodo, Muhammad Haniv, dan Agus Suharsono. Acara tersebut sekaligus menjadi panggung keempat widyaiswara tersebut untuk mendapat pengukuhan dan menduduki jabatan fungsional sebagai widyaiswara ahli utama.



Bertempat di Auditorium Prof. Agus Dwiyanto, keempat widyaiswara tersebut melakukan orasi ilmiah yang terbagi dalam dua hari.

Pada hari pertama (Selasa), widyaiswara yang tampil sebagai orator adalah Bjardianto Pudjiono dan Rudy Widodo. Di hadapan majelis orasi ilmiah, Bjardianto yang merupakan widyaiswara Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) ini menyampaikan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Dampak Pengelolaan PUG Terhadap Kinerja Pegawai dengan Mediasi Komitmen Organisasi. Karya tulis ini merupakan hasil penelitiannya pada pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Sedangkan Rudy Widodo memaparkan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akurasi Perencanaan Kas Keluar Tingkat Satuan Kerja. Widyaiswara dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) ini banyak membahas tentang rencana penarikan dana harian yang dilaksanakan oleh satker-satker pada umumnya. "Hasil penelitian ini penting agar dapat memberi bukti empiris atas implementasi kebijakan di bidang pengelolaan kas,"



Rudy Widodo memaparkan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akurasi Perencanaan Kas Keluar Tingkat Satuan Kerja

Di hari kedua, widyaiswara yang tampil sebagai orator adalah Muhammad Haniv dan Agus Suharsono. Haniv menyampaikan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Negara Perpajakan. “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perilaku pergerakan beberapa indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, PDB, dan ekspor/import serta pergerakan penerimaan pajak,” jelas widyaiswara Pusdiklat Pajak ini. Seperti yang diketahui, penerimaan pajak menopang hampir 85% dari seluruh penerimaan negara.

Adapun narator terakhir, Agus Suharsono, memaparkan karya tulis ilmiahnya yang berjudul Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Instansi Pemerintah dalam Hukum Pajak Indonesia. Dalam penjelasannya, widyaiswara dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta ini menyarankan agar naskah akademis Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) memasukkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan evaluasi substansi. “Supaya penyelesaian sengketa kewenangan antar instansi pemerintah diselesaikan berdasarkan hukum administrasi.

14. Festival Budaya Bangsa BPPK, Ajang Tingkatkan Rasa Memiliki BPPK

Rabu, 18 September 2019. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan acara Festival Budaya Bangsa BPPK dengan mengusung tema #AkuBPPK. Acara yang berlangsung selama tiga bulan (Juli - September 2019) ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta dan memiliki (sense of ownership) bagi seluruh pegawai di lingkungan BPPK.

Rangkaian acara Festival Budaya Bangsa BPPK ini diawali dengan penyelenggaraan kompetisi terkait capturing idea pada bulan Juli 2019 yang terkemas dalam beberapa format perlombaan. Adapun kompetisi yang diikuti oleh seluruh pegawai BPPK tersebut adalah Film Pendek, Video Knowledge Capture, Foto Historia, dan Tulisan Essay "Dear BPPK". Tak tanggung-tanggung, perlombaan tersebut mendapat penilaian langsung oleh dewan juri yang ahli di bidangnya. Sebut saja Nia Dinata (film director), Deva Mahendra (artis/entertainment anchor Net TV), Hermanus Prihatna (fotographer Antara), dan Ika Natassa (penulis populer). Kompetisi ini berhasil memancing antusiasme yang besar dari para peserta, terbukti dengan banyaknya hasil karya pegawai BPPK yang terkumpul di panitia.



Menteri Keuangan Srimulyani Idrawati di acara Festival Budaya Bangsa BPPK dengan mengusung tema #AkuBPPK



Sesi foto pemenang lomba Festival Budaya Bangsa BPPK dengan mengusung tema #AkuBPPK



Sesi foto bersama Menteri Keuangan dengan peserta #AkuBPPK

15. BPPK Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM dengan JPPH Malaysia

Pada hari Sabtu, 21 September 2019, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menjalin kerja sama teknik (*technical cooperation*) dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Malaysia di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kesepakatan itu tercapai dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dari kedua belah pihak yang berlangsung di Novotel Bogor.

Kepala BPPK, Rionald Silaban mengungkapkan bahwa kerja sama teknik ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas SDM Kementerian Keuangan di bidang penilaian aset negara dan *real estate*. Adapun bentuk program pengembangan kerja sama yang dimaksud meliputi pelatihan,

riset gabungan, pertukaran mahasiswa/dosen, konferensi/seminar, hingga *knowledge sharing* dan lokakarya penilaian aset negara. Dalam implementasinya, BPPK menunjuk Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Di sisi lain, JPPH telah menetapkan Institut Penilaian Negara (Inспен) sebagai unit penanggung jawab dari pihaknya.



Penandatanganan MoU antara BPPK dan JPPH Malaysia

Tercapainya kerja sama ini tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang telah menjembatani antara BPPK dengan JPPH. Oleh karena itu, Rionald berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak terlibat yang telah bersinergi dalam kerja sama ini. ?Semoga kerja sama ini akan memberikan keuntungan bagi kejayaan kedua belah pihak (BPPK dan JPPH), lebih luas lagi bagi Kementerian Keuangan dan RI,? ujar Rionald.



Kunjungan JPPH Malaysia ke Pusdiklat AP dan KPKNL Bogor



Pemberian kenang-kenangan oleh Kepala BPPK, Rionald Silaban (kiri) kepada Ketua Pengarah JPPH, Malaysia Ahmad Zailan (kanan)

JPPH turut mengucapkan terima kasih atas sambutan baik yang diterima selama berada di Indonesia. Sebagai informasi, JPPH juga menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke sejumlah unit kerja Kementerian Keuangan di Bogor, yaitu Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor. (LH)



Kunjungan JPPH Malaysia ke Pusdiklat AP dan KPKNL Bogor

16. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL) TA 2019

Untuk menjaga keberlangsungan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dan guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna layanan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan bekerja sama dengan Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Sasaran dari penyelenggaraan survei dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan serta opini/pendapat publik mengenai pelayanan dan integritas pegawai

Tim UGM bersama Biro Organta mengharapkan kesediaan dan partisipasi BPPK selaku pemilik layanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk dapat melaksanakan kegiatan pengambilan data, observasi dan evaluasi Pengumpulan Data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) dengan dipandu oleh petugas survei (*enumerator*)/peneliti dan Biro Organta Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusdiklat PPSDM, PKN STAN, dan Kota Balikpapan.

Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Pengambilan Data Layanan BPPK 2 (Seleksi Pasca Sarjana) Dilaksanakan pada tgl 16 September 2019 bertempat di Aula PPSDM, jumlah responden berada di kelas *Pre-departure* di PPSDM, jumlah responden yaitu 49 orang. Pengambilan data menggunakan kuesioner fisik dibantu oleh 12 enumerator. Lama waktu pengambilan data 45 menit, mengambil waktu

istirahat responden pukul 11.45 s.d 12.30 WIB. Pada saat pengambilan data responden dan enumerator disediakan konsumsi berupa snack siang oleh Sekretariat Badan.

2. Pengambilan Data Layanan BPPK1 (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN) tanggal 1 s.d 3 Oktober 2019. Jumlah responden yang direncanakan adalah 157 responden dengan rincian antara lain :

Tabel 1.1 Jumlah Responden SPMB PKN STAN Per Kota

No.	Asal Kota Responden	Jumlah Responden
1.	Pekanbaru	23
2.	Medan	35
3.	Jakarta	35
4.	Balikpapan	10
5.	Surabaya	34
6.	Makassar	20

Kegiatan tersebut setiap harinya dibagi menjadi 4 *batch*, setiap *batch* menggunakan waktu 1 jam, dimulai dari jam 09.00 sampai dengan 14.00 WIB, istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. Jumlah enumerator yang hadir setiap hari adalah 6 orang, 4 orang enumerator yang bertugas di Jakarta dan 2 enumerator yang bertugas di Batam (Pekanbaru).

Setiap *batch* memiliki target 13 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner, yang seharusnya menggunakan aplikasi, dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah enumerator maka tidak dimungkinkan menggunakan aplikasi.

Pada hari pertama terdapat 5 responden yang belum mengikuti pengambilan data, pada hari kedua 5 responden tersebut akhirnya mengikuti kegiatan, tetapi ada 1 responden yang pada hari kedua tidak mengikuti kegiatan. Di hari ke-3 ada 2 responden yang tidak mengikuti pengambilan data dikarenakan cuti sakit dan tidak melanjutkan kuliah di PKN STAN. Kedua responden tersebut berasal dari Balikpapan dan Makassar.

Setelah berkoordinasi dengan tim Peneliti UGM dan Kasubama PKN STAN, maka *enumerator* menitipkan kuesioner dan akan berkomunikasi langsung dengan responden melalui telepon atau email. Pada tanggal 4 Oktober 2019, semua responden telah diambil datanya.

Pada Saat pengambilan data responden, *enumerator* dan panitia mendapatkan fasilitas konsumsi yang disediakan oleh Sekretariat Badan.

3. Monitoring dan Evaluasi Enumerator

Tujuan monitoring dan evaluasi (*monev*) *enumerator* adalah untuk memastikan apakah *enumerator* yang mengambil data sudah sesuai dengan standar dan pedoman pengambilan

data. Mekanisme yang digunakan adalah saling silang, sehingga BPPK tidak melaksanakan money untuk BPPK tetapi melaksanakan money untuk unit eselon 1 lainnya.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 September 2019. Pada tahun ini, BPPK berkesempatan money untuk unit DJKN yaitu layanan risalah lelang dan layanan lelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Balikpapan. Responden yang ditemui berjumlah 2 orang. Sebelum melaksanakan money, ada kegiatan briefing bersama tim dari organta dan para enumerator untuk kota Balikpapan. Kegiatan money tersebut menggunakan dana dari DIPA masing-masing unit.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan money tersebut adalah longlist yang diberikan BPPK untuk pengambilan data sudah terpenuhi dan tidak ada masalah dan meyakini bahwa enumerator dalam mengambil data sudah sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Tim Peneliti UGM.

P E N U T U P

BPPK sebagai mitra strategis bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai. Besarnya dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Laporan kinerja Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK pada Tahun 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Besaran Nilai Kinerja Organisasi adalah 113,39. Lima dari delapan belas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui targetnya merupakan cerminan efektivitas kinerja BPPK yang baik. Namun demikian, masih ada Tiga Belas indikator kinerja yang masih berstatus abu-abu. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi kelembagaan serta upaya aktif anti korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.

Dari sisi penggunaan anggaran, periode Tahun 2019, BPPK mendapat anggaran sebesar RP 635.393.838.000,00 atau lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, dan untuk Tahun 2019 terealisasi penyerapan sebesar Rp. 608.639.762.386. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan rencana penyerapan atau proyeksi anggaran yang ditetapkan.

Realisasi dan capaian anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	635.293.838.000	608.639.762.386	95,80
1731	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Negara Di Daerah	159.286.544.000	151.004.054.192	94,80
1732	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan	27.921.526.000	26.351.932.677	94,38
1733	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Kepabeanaan Dan Cukai	27.397.893.000	25.164.966.472	91,85

1734	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan	28.425.646.000	25.861.647.063	90,98
1735	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai, Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan	27.050.063.000	26.534.074.287	98,09
1736	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Perpajakan	35.743.823.000	34.893.305.820	97,62
1737	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Departemen Keuangan	125.037.747.000	120.168.800.587	96,11
1738	Pengembangan Sdm Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	147.058.823.000	143.082.479.467	97,30
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja Di Lingkungan Bppk	57.371.773.000	55.578.501.821	96,87

Sedangkan Capaian IKU BPPK Tahun 2019 adalah:

1. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya dengan realisasi sebesar 96.03%, dari target sebesar 90%.
2. Persentase Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya dengan realisasi sebesar 99,78% dari target sebesar 75%.
3. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dengan realisasi sebesar 95,38% dari target sebesar 92 %.
4. indeks kepuasan pengguna layanan dengan realisasi sebesar 4,73 dari target sebesar 4,39.
5. Presentase pengembangan Instructional System Design dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.
6. Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital dengan realisasi sebesar 49,55% dari target sebesar 30%.
7. Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC dengan realisasi sebesar 114,52% dari target sebesar 100%.
8. Indeks kualitas penelitian dengan realisasi sebesar 98 dari target sebesar 50.
9. Persentase kualitas implementasi program sertifikasi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 70 %.
10. Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A dengan realisasi sebesar 100 %, dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
11. Indeks pemenuhan standar mutu dengan realisasi sebesar 4, dari target sebesar 3.

12. Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan realisasi sebesar 97,47 %, dari target yang ditetapkan sebesar 94%.
13. Persentase proses penempatan talent pada jabatan target dengan realisasi sebesar 92,75 %, dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
14. Indeks pemenuhan standar mutu dengan realisasi sebesar 91,54, dari target sebesar 90,45.
15. Persentase penyelesaian program transformasi digital dengan realisasi sebesar 99,91%, dari target sebesar 80%.
16. Persentase Tingkat downtime sistem TIK dengan realisasi sebesar 0%, dari target 0,10%.
17. Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 98,20%, dari target sebesar 90%.
18. Presentasi kualitas pelaksanaan anggaran dengan realisasi sebesar 99,48%, dari target yang ditetapkan sebesar 95%.



LAMPIRAN I

Pengukuran Kinerja BPPK tahun 2019

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Unit

Organisasi : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Program : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)				106,7
1	SDM yang berkinerja tinggi			106,7
1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	96,03%	106,7
CUSTOMER PERSPECTIVE (15%)				109,79
2	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan			111,84
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	75%	99,78%	120
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	92%	95,38%	103,67
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			107,74
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,39	4,73	112,66
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)				113,21
4	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi			100
4a-N	Presentase pengembangan <i>Instructional System Design</i>	100%	100%	100
5	Program pembelajaran yang kreatif			120
5a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	30%	49,55%	120
6	Manajemen pengetahuan yang berkualitas			117,26
6a-N	Tingkat pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	114,52%	114,52
6b-N	Indeks kualitas penelitian	50	98	120
7	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan			120
7a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%	100%	120
8	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif			108,8
8a-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%	100%	100
8b-N	Indeks pemenuhan standar mutu	3	3	120

<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i> (30%)				111,5
9	SDM yang kompeten			109,81
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	94%	97,47%	103,69
9b-N	Persentase proses penempatan talent pada jabatan target	80%	92,75%	115,94
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>			110,39
10a-CP	Indeks Persepsi Integritas	90,45	91,64	101,32
10b-CP	Persentase penyelesaian program transformasi digital	80%	99,91%	120
11	Sistem informasi manajemen yang andal			120
11a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0%	120
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			106,12
12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKBA 15 yang telah ditindaklanjuti	90%	86,89%	109,11
12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,48%	104,72
	Nilai Kinerja Organisasi			110,66

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp 635.393.838.000
 Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp 608.639.762.386

Kepala Badan

(ttd)

Rionald Silaban



LAMPIRAN II

Kontrak Kinerja BPPK tahun 2019



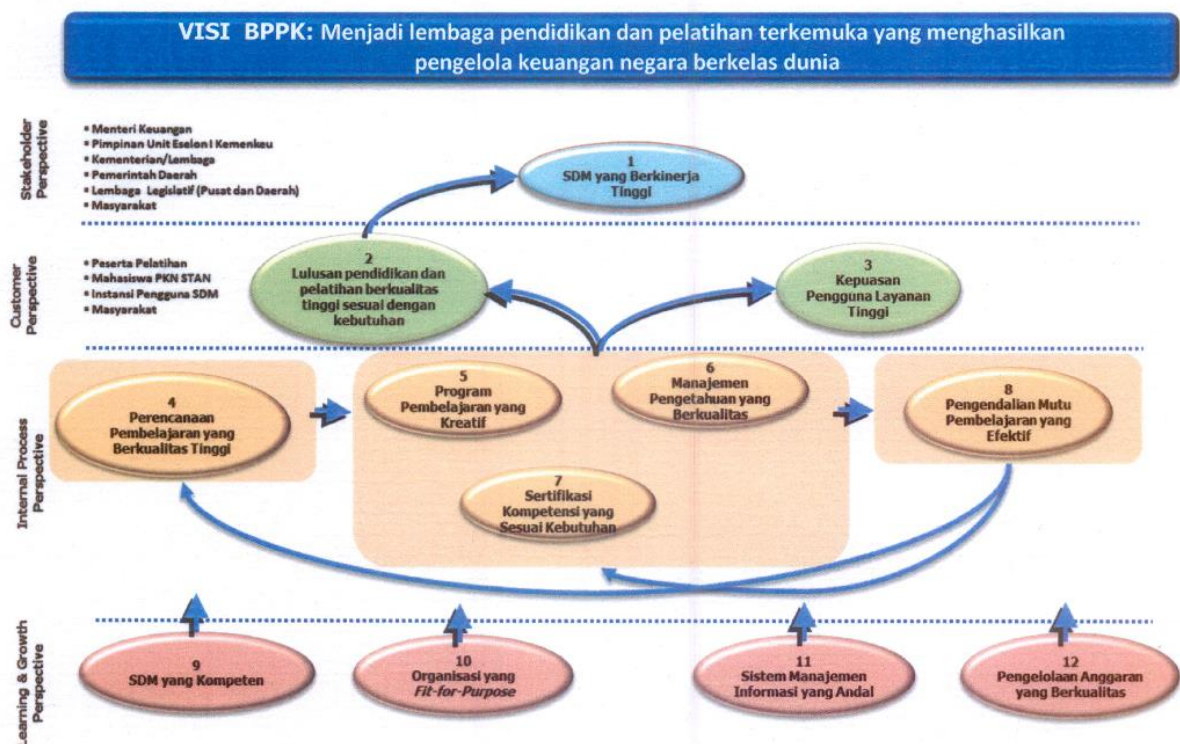
KONTRAK KINERJA
NOMOR: 11/KK/2019
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	SDM yang berkinerja tinggi	1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2.	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan	2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	75%
		2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	92%
3.	Kepuasan pengguna layanan tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,39 (skala 5)
4.	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi	4a-N	Persentase pengembangan <i>Instructional System Design</i>	100%
5.	Program pembelajaran yang kreatif	5a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	30%
6.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas	6a-N	Tingkat pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC	100%
		6b-N	Indeks kualitas penelitian	50
7.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan	7a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	70%
8.	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif	8a-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	100%
		8b-N	Indeks pemenuhan standar mutu	3 (skala 5)
9.	SDM yang kompeten	9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94%
		9b-N	Persentase proses penempatan <i>talent</i> pada jabatan target	80%
10.	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10a-CP	Indeks Persepsi Integritas	90,45
		10b-CP	Persentase penyelesaian program transformasi digital	80%
11.	Sistem manajemen informasi yang andal	11a-CP	Persentase <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	90%
		12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

RA

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	Rp 168.686.192.000,-
2. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Rp 27.293.676.000,-
3. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Rp 27.034.309.000,-
4. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Rp 27.392.610.000,-
5. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Rp 26.712.404.000,-
6. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	Rp 35.556.080.000,-
7. Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan	Rp 115.438.476.000,-
8. Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara STAN)	Rp 147.058.823.000,-
9. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	Rp 60.221.277.000,-

Jakarta, Januari 2019

Menteri Keuangan,



Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,



Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	SDM yang berkinerja tinggi							
1a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	-	-	-	-	90%	90%
2.	Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan							
2a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	-	-	-	-	-	75%	75%
2b-N	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
3.	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4,39	4,39 (skala 5)
4.	Perencanaan pembelajaran yang berkualitas tinggi							
4a-N	Persentase pengembangan <i>Instructional System Design</i>	21,28%	47,34%	47,34%	81,38%	81,38%	100%	100%
5.	Program pembelajaran yang kreatif							
5a-N	Persentase penyelenggaraan pembelajaran digital	-	8%	8%	-	8%	30%	30%
6.	Manajemen pengetahuan yang berkualitas							
6a-N	Tingkat pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC	49,33%	73,00%	73,00%	88,83%	88,83%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas penelitian	-	-	-	-	-	50	50
7.	Sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan							
7a-N	Persentase kualitas implementasi program sertifikasi	-	-	-	-	-	70%	70%

Handwritten signature/initials

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif							
8a-N	Persentase program pelatihan yang mendapatkan nilai validasi A	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8b-N	Indeks pemenuhan standar mutu	-	3	3	-	3	3	3 (skala 5)
9.	SDM yang kompeten							
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	94%	94%	-	94%	94%	94%
9b-N	Persentase proses penempatan <i>talent</i> pada jabatan target	-	-	-	-	-	80%	80%
10.	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
10a-CP	Indeks Persepsi Integritas	-	-	-	-	-	90,45	90,45
10b-CP	Persentase penyelesaian program transformasi digital	9,67%	25,40%	25,40%	32,11%	32,11%	80%	80%
11.	Sistem manajemen informasi yang andal							
10a-CP	Persentase <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	90%	90%
12b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	10%	30%	30%	60%	60%	95%	95%

Jakarta, Januari 2019

PNS yang dinilai,


 Rionald Silaban
 NIP 19660423 199010 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sri Mulyani Indrawati	1	Nama	Rionald Silaban
2	NIP	-	2	NIP	19660423 199010 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	IV/e/Pembina Utama
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Meningkatkan kinerja alumni pelatihan		90%	100	12	-
2.	Meningkatkan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan		75%	100	12	-
3.	Menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan dari Kemenkeu dengan predikat minimal baik		92%	100	12	-
4.	Memenuhi kepuasan pengguna layanan		4,39 (skala 5)	100	12	-
5.	Mengembangkan <i>instructional system design</i>		100%	100	12	-
6.	Menyelenggarakan pembelajaran digital		30%	100	12	-
7.	Meningkatkan pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC		100%	100	12	-
8.	Memenuhi indeks kualitas penelitian		50	100	12	-
9.	Meningkatkan kualitas implementasi program sertifikasi		70%	100	12	-
10.	Menghasilkan program pelatihan dengan nilai validasi A		100%	100	12	-
11.	Memenuhi Standar Mutu		3 (skala 5)	100	12	-
12.	Meningkatkan pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan		94%	100	12	-
13.	Menempatkan <i>talent</i> pada jabatan target		80%	100	12	-
14.	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi		90,45 (skala 100)	100	12	-
15.	Menyelesaikan program transformasi digital		80%	100	12	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
16.	Mengendalikan <i>downtime</i> sistem TIK		0,10%	100	12	-
17.	Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LK BA 15		90%	100	12	-
18.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95%	100	12	Rp 553,54 M

Pejabat Penilai,



Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, Januari 2019

PNS yang dinillai,



Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

INISIATIF STRATEGIS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	Pelaksanaan program pelatihan pengelolaan Dana Desa	2400 peserta dan nilai peningkatan kompetensi SDM sebesar 23 poin	Q1: Persiapan dan Penyelenggaraan Pelatihan tahap I	Q1: 1608 peserta	Januari s.d Desember 2019	Pusdiklat KNPK	12,04 M
				Q2: Penyelenggaraan Pelatihan Tahap II	Q2: 792 peserta			
				Q3: -	Q3: -			
				Q4: Evaluasi pasca pembelajaran dan pembentukan desa percontohan	Q4: Laporan evaluasi pasca pembelajaran			
2.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Pelatihan perpajakan di bidang Ekonomi Digital	210 peserta	Q1: Persiapan Pelatihan	Q1: Desain Pembelajaran	Januari s.d Desember 2019	Pusdiklat Pajak	473 juta
				Q2: Pelayanan Kelas	Q2: 60 peserta			
				Q3: Pelayanan Kelas	Q2: 150 peserta			

x/

				Q4: Penilaian Kompetensi	Q4: Nilai Peningkatan Kompetensi sebesar 23			
3.	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	Pelatihan Perpajakan di Bidang Ekonomi Digital	150 peserta	Q1: Persiapan Pelatihan dan Pelayanan Kelas	Q1: Desain Pembelajaran dan 30 Peserta	Maret s.d. September 2019	Pusdiklat Bea dam Cukai	601 juta
				Q2: Pelayanan Kelas	Q2: 30 Peserta			
				Q3: Pelayanan Kelas	Q3: 60 Peserta			
				Q4: Pelayanan Kelas	Q4: 30 Peserta			

Jakarta, Januari 2019

PNS yang dinilai,


 Rionald Silaban
 NIP 19660423 199010 1 001